TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 15 - 21 Oktober 2025
No. 4106
Tahun LVI



8 HKTI Satu dan Menyatukan

10 Mulyono Herlambang, Eks Penyuluh Taklukan Pasar Global

14 Swasembada Protein, Kementan Buka Pintu untuk Investor



MENAKAR SNI WAJIB BERAS



EDITORIAL

HKTI dan PR Pertanian

Setelah dinanti-nanti pasca Munas ke-10 HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) yang berlangsung di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (24/6), akhirnya pengurus DPN HKTI periode 2025-2030 dikukuhkan pada Jumat (3/10). Kini HKTI memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian.

Setelah sempat mendua antara kubu Prabowo Subianto yang kemudian diteruskan Fadli Zon dengan Osman Sapta yang dilanjutkan Moeldoko, kini organisasi pertanian terbesar di Indonesia ini kembali bersatu. Pengukuhan pengurus DPN HKTI Periode 2025-2030 menjadi momentum memasuki babak baru tersebut.

Seperti kata Ketua Umum DPN HKTI terpilih Sudaryono, HKTI kini satu, menyatukan dan mempersatukan. Tidak ada lagi dualisme dan sekat yang dulu pernah terjadi. Nampak dari susunan pengurus yang telah membaur. Dewan Pembina HKTI langsung dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih pun masuk jajaran pengurus.

Diantaranya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Kepala Bappanas/menteri PPN, Prof. Rachmat Pambudy dan Arief Prasetyo Adi. Bahkan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat. Ada nama besar lainnya yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Ketua Dewan Kehormatan) dan Oesman Sapta Odang (Ketua Dewan Pertimbangan).

Sejumlah Wakil Menteri (Wamen) ikut bergabung sebagai pengurus inti Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI. Deretan Wamen yang resmi bergabung antara lain Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, yang dipercaya sebagai Waketum Bidang Perdagangan.

Ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria sebagai Waketum Bidang Pengembangan dan Potensi Desa. Selain itu ada Taufik Madjid yang kini menjabat Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Wakil Menteri Kehutanan, Rahmat Marzuki juga masuk dalam jajaran pengurus DPN HKTI.

Bukan hanya itu, pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertanian juga tercatat sebagai bagian dalam pengurus DPN HKTI. Misalnya, Andi Nur Alam Syah (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian), Idha Widi Arsanti (Kepala BPPSDMP), Yudi Sastro (Dirjen Tanaman Pangan) dan Agung Suganda (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Salah satu publik figur yang menjadi sorotan dalam kepengurusan Sudaryono adalah Raffi Ahmad juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Humas. Keterlibatan Raffi Ahmad yang selama ini memang dekat dengan Ketua Umum HKTI Sudaryono diharapkan dapat menarik generasi muda terjun ke dunia pertanian.

Kepengurusan HKTI kali ini memang terbilang sangat besar. Setidaknya ada 582 nama pengurus yang terbagi diberbagai bidang. Kehadiran berbagai tokoh publik menandai babak baru HKTI sebagai organisasi petani yang tidak hanya solid, tetapi juga strategis. Dari jalur pemerintahan hingga jalur populer, semua dirangkul untuk satu tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Seperti diketahui Pekerjaan Rumah (PR) pembangunan pertanian masih menumpuk di tengah tantangan yang semakin banyak.



SAUNG TANI

Pemerintah berniat terapkan wajib SNI beras
- Jangan buru-buru, hitung baik buruknya.

Rafi Ahmad masuk jajaran pengurus HKTI
- Tambah rame neh...

Presiden ganti Kepala Badan Pangan Nasional
- Ada apa neh?

MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Setelah Pangan, kini Saatnya Hilirisasi

Arah baru pembangunan pertanian yang kini berfokus pada hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Langkah ini menjadi tindak lanjut setelah target pangan nasional optimis tercapai.

Setelah pangan dinilai aman, arah pembangunan pertanian ke depan akan difokuskan pada hilirisasi sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Hilirisasi merupakan strategi utama agar Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, melainkan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi.

Pemerintah saat terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.

Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran.

Misalnya, komoditas kelapa. Potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan Rp 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang lebih luas, Kementan juga mulai mengembangkan komoditas lain yang berpotensi besar di pasar dunia. Bisa untuk siri, bisa untuk sampo dan seterusnya.

Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Arah kebijakan hilirisasi sawit terintegrasi dengan program biofuel dan bioethanol nasional. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi mencapai 46 juta ton per tahun akan mengalihkan sebagian ekspor menjadi bahan baku B50 (biodiesel) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Jika 5,3 juta ton CPO dialihkan untuk B50, kita bisa menghentikan impor solar dan sekaligus menghemat devisa. Selain itu, kita dapat mengendalikan harga CPO dunia, karena 60 persen produksinya ada di Indonesia. Mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor ke seluruh dunia, termasuk CPO, kita hilirisasi. Khusus CPO dikuasai pemerintah.

Program hilirisasi ini juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp9,95 triliun, Kementan menyiapkan bantuan benih dan bibit gratis untuk petani di seluruh Indonesia, mencakup 800 ribu hektare lahan perkebunan yang diproyeksikan mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja baru dalam dua tahun.

Capaian besar ini tidak lepas dari dukungan penuh Presiden RI serta penyederhanaan regulasi yang selama ini menghambat distribusi dan produksi. Regulasi pupuk yang sebelumnya melibatkan 145 aturan kini disederhanakan menjadi tiga tahap: dari produsen langsung ke petani. Kami optimisme terhadap cita-cita besar kemandirian pangan dan energi nasional. Ini mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Insya Allah mudah-mudahan tiga tahun jadi kenyataan.

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Anggrek, Tak Pernah Pudar di Pasar Hortikultura



Anggrek tetap jadi primadona di dunia hortikultura. Keindahan dan keunikannya tak hanya memikat mata, tapi juga mendatangkan nilai ekonomi tinggi bagi para pembudidaya dan pecinta tanaman hias.

Di antara banyaknya tanaman hias yang silih berganti tren, anggrek tetap berdiri anggun di puncak popularitasnya. Bunga ini seperti tak lekang oleh waktu, selalu punya pesona, selalu punya pasar. Keindahan dan keunikan bentuk serta warnanya membuat anggrek tidak hanya disukai oleh pecinta tanaman hias, tapi juga menjadi komoditas bernilai tinggi dalam dunia hortikultura.

Anggrek merupakan tanaman dari keluarga Orchidaceae, salah satu kelompok tumbuhan terbesar di dunia dengan lebih dari 25.000 spesies. Di Indonesia, sekitar 5.000 jenis anggrek tumbuh secara alami di berbagai wilayah, mulai dari hutan tropis Sumatera hingga pegunungan Papua. Kekayaan biodiversitas ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman anggrek terbesar di dunia.

Keunikan anggrek terletak pada bentuk bunga yang beragam, warna yang menawan, dan aroma yang khas. Jenis-jenis populer seperti Anggrek Bulan (*Phalaenopsis*), Dendrobium, Cattleya, dan Vanda, sering menjadi primadona di pasar tanaman hias.

Anggrek Bulan bahkan dinobatkan sebagai bunga nasional Indonesia, melambangkan keindahan, kesempurnaan, dan cinta abadi, karakter yang seolah mencerminkan daya tahannya di pasar hortikultura.

Namun daya tarik anggrek tak hanya berhenti di keindahan visual. Bunga ini juga punya makna simbolis dan nilai budaya yang tinggi. Dalam banyak acara, anggrek kerap hadir sebagai bunga penghias pernikahan, simbol penghargaan, hingga bagian dari dekorasi hotel dan perkantoran. Tak heran jika permintaannya jarang surut, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Meski dunia tanaman hias kerap berubah tren, dulu monstera dan hoya sempat mendominasi, anggrek selalu punya tempat spesial. Ia bukan sekadar tren musiman, melainkan simbol keanggunan yang abadi. Dalam bisnis florikultura, anggrek juga punya nilai tambah karena daya tahannya tinggi dan perawatannya relatif mudah jika sudah beradaptasi.

Kini, dengan hadirnya varietas hibrida yang lebih tahan terhadap cuaca tropis, petani semakin diuntungkan. Produksi bisa dilakukan sepanjang tahun, dan kualitas bunga tetap stabil. Inovasi warna dan bentuk bunga juga menambah daya tarik pasar, terutama untuk segmen premium.

Sumber Cuan

Budidaya anggrek kini tak lagi sekadar hobi para pecinta tanaman. Banyak petani dan pelaku usaha kecil menengah yang mulai menjadikannya ladang bisnis menjanjikan. Potensi ekonominya besar, terutama karena anggrek bisa dipasarkan dalam berbagai bentuk yaitu tanaman pot, rangkaian bunga potong, hingga bibit hasil kultur jaringan.

Harga satu pot anggrek *Phalaenopsis* berkualitas tinggi bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan tingkat kematangannya.

Selain itu, industri pendukung seperti media tanam, pupuk khusus anggrek, dan aksesori pendukung juga ikut tumbuh pesat. Pasar dalam negeri yang kuat ditambah minat kolektor dari luar negeri menciptakan peluang ekspor yang terus berkembang.

Negara-negara seperti Thailand, Taiwan, dan Belanda sudah lebih dulu menguasai pasar global anggrek. Namun Indonesia, dengan kekayaan varietas lokalnya, sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing. Beberapa pelaku usaha di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera sudah mulai menembus pasar ekspor, terutama ke Jepang dan Eropa.

Menurut data Kementerian Pertanian, nilai ekspor florikultura Indonesia, termasuk anggrek menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengelolaan yang lebih terarah, kontribusi anggrek terhadap ekonomi hortikultura nasional bisa semakin besar.

Inovasi Budidaya

Kunci keberhasilan budidaya anggrek terletak pada inovasi. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah kultur jaringan, yaitu teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif di laboratorium. Metode ini memungkinkan petani menghasilkan bibit unggul dalam jumlah banyak, dengan waktu yang lebih singkat dan kualitas yang seragam.

Selain itu, sistem rumah tanam modern (*greenhouse*) juga mulai banyak diterapkan, terutama untuk menjaga kelembapan dan suhu yang ideal. Pemanfaatan teknologi digital turut membantu petani memasarkan produk secara lebih luas, mulai dari marketplace tanaman hias hingga media sosial.

Tidak sedikit generasi muda yang kini terjun ke bisnis anggrek karena melihat peluang besar di pasar online. Mereka tidak hanya menjual bunga, tapi juga menciptakan brand experience, menawarkan keindahan, gaya hidup, dan sentuhan personal dalam setiap pot anggrek yang dijual.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong pengembangan florikultura, termasuk anggrek, sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor nonpangan. Program pembibitan, pelatihan, dan pengembangan varietas lokal menjadi fokus utama agar petani bisa bersaing di pasar global.

Selain itu, berbagai pameran hortikultura nasional dan internasional rutin digelar, seperti Flona Jakarta, Indofloriculture Expo, dan Orchid Show di berbagai daerah. Ajang ini menjadi tempat bertemunya pelaku usaha, peneliti, hingga komunitas pecinta anggrek untuk saling berbagi ilmu dan memperluas jaringan.

Peran komunitas pun tak kalah penting. Banyak kelompok pecinta anggrek yang aktif mengedukasi masyarakat tentang perawatan, budidaya, dan konservasi. Gerakan ini membantu menjaga kelestarian spesies anggrek endemik Indonesia agar tidak punah akibat perburuan liar.

Bunga ini membuktikan bahwa keindahan bisa berjalan seiring dengan nilai ekonomi, dan bahwa sesuatu yang tumbuh perlahan, bisa bertahan selamanya.

Anggrek tak pernah pudar, baik di taman, di pasar, maupun di hati para pecintanya.

Penulis Djanu Sutrino

Brasil Siap Salip Produksi Kopi Vietnam, RI Perlu Belajar

CATATAN Begawan



Brasil menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Bahkan menurut laporan Rabobank, Brasil berpotensi menjadi produsen utama kopi robusta. Rabobank memproyeksikan produksi robusta Brasil mencapai 24,7 juta karung pada tahun 2025

Produktivitas tinggi mengimbangi biaya implementasi robusta yang tinggi, Rabobank memperkirakan dalam empat tahun Brasil memposisikan dirinya untuk menyalip Vietnam sebagai produsen kopi robusta terbesar di dunia. Hal ini didorong oleh ketahanan iklim tanaman tersebut dan meningkatnya permintaan global.

Produksi kopi Robusta di Brasil telah tumbuh secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan mencapai 24,7 juta karung 60 kg pada tahun 2025. Menurut proyeksi Rabobank, naik dari 19 juta karung pada tahun 2020. Vietnam diperkirakan akan memproduksi sekitar 30 juta karung robusta pada tahun 2025/26, menurut Departemen Pertanian AS.

Suhu maksimum di wilayah utama penghasil kopi Brasil telah meningkat 1,3 hingga 1,6 derajat Celsius selama 50 tahun terakhir, sementara curah hujan rata-rata telah menurun 93 hingga 211 milimeter, kata laporan itu.

Irigasi telah muncul sebagai strategi adaptasi yang penting, kata bank tersebut, seraya menambahkan bahwa sekitar 71% ladang robusta Brasil sekarang telah diairi oleh irigasi dengan proyeksi yang menunjukkan bahwa areal yang mempunyai irigasi dapat mencapai 363.800 hektar pada tahun 2040.

Laporan tersebut menyebutkan biaya implementasi perkebunan robusta cukup tinggi, sekitar $15.700 per hektar. Produktivitas tanaman ini yang jauh lebih tinggi—hampir 170% lebih tinggi hasil panen per hektar daripada arabika—membantu mengimbangi biaya tersebut, dengan perkiraan pengembalian modal sekitar empat tahun, kata Rabobank.

Brasil memiliki sekitar 28 juta hektar lahan penggembalaan terdegradasi yang cocok untuk konversi pertanian, yang memungkinkan perluasan areal kopi yang bebas deforestasi. Pengecualian kopi instan dari aturan deforestasi Uni Eropa diperkirakan akan semakin meningkatkan permintaan terhadap produk berbasis robusta, yang berpotensi mempercepat pertumbuhan produksi Brasil, kata laporan itu.

Perkembangan di Brasil ini patut dikaji lebih lanjut oleh para pakar kopi Indonesia. **(Sumber : Reuters)**



MENAKAR SNI WAJIB BERAS

Paska kegaduhan masalah beras di dalam negeri, terutama terkait beras oplosan, pemerintah mengambil ancang-ancang akan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib beras. Sebelumnya pemerintah hanya memberlakukan SNI beras yang sifatnya sukarela kepada pelaku usaha dengan SNI 6128:2020 Beras. Pertanyaannya sejauh mana mendesaknya SNI wajib beras tersebut?

Kasus ramainya beras oplosan yang kemudian pemerintah klarifikasi menjadi beras turun mutu tersebut telah 'memakan korban' beberapa industri beras dalam negeri. Salah satunya BUMD DKI Jakarta, PT. Food Station Tjipinang dengan merek beras FS. Bukan hanya itu, kasus tersebut sempat membuat beras premium 'menghilang' dari pasaran, sehingga membuat konsumen kesulitan.

Beberapa industri beras kemudian mengalihkan produksi, dari beras premium menjadi beras khusus dengan harga menembus angka Rp 100 ribu/kemasan (5 kg) atau jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 74.900/kemasan. Kenaikan harga beras di pasar, kemudian mendorong pemerintah menggelontorkan beras SPHP dengan harga Rp 62.500/ kemasan.

Menyikapi masalah terkait dengan persoalan mutu beras, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun kembali regulasi terkait keamanan dan mutu beras sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini menjadi dasar bagi pengawasan keamanan, mutu gizi, label, dan iklan untuk pangan segar. Apalagi beras merupakan salah satu komoditas strategis yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional, Yusra Egayanti, menjelaskan, regulasi yang sedang disusun ini kini menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menerbitkan nomor izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Dalam peraturan tersebut, beras didefinisikan sebagai hasil utama dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya telah terkelupas, sementara lapisan aleuronnya dapat dipertahankan sebagian atau seluruhnya dipisahkan.

Namun menurutnya, jika mengacu ke Undang-Undang Pangan, terkait dengan mutu sebenarnya prinsipnya adalah sukarela. Tapi Jika terkait dengan keamanan misalnya cemaran dan residu itu baru wajib. Nantinya akan diaturnya melalui regulasi teknis. "Jadi kalau mutu sebenarnya sukarela. Kalau sukarela jalurnya tentu SNI itu," ujarnya.

Sementara itu, jika suatu produk masuk dalam kategori risiko tinggi dengan pertimbangan target konsumen `tertentu, seperti orang sakit atau yang dikonsumsi secara luas, dan termasuk komoditas strategis seperti beras, maka ketentuan mutu diatur melalui jalur regulasi. "Misalnya, pemerintah telah membuat regulasi HET (Harga Eceran tertinggi) beras. Karena itu, ketentuan mutunya diatur melalui regulasi juga," kata Ega mencontohkan.

Ega menegaskan, dalam menyusun regulasi harus mengacu pada indeks kualitas kebijakan yang diukur LAN (Lembaga Administrasi Negara). Selain itu, ada *regulatory impact assessment* yang harus dilakukan sebelum peraturan berlaku. "Ada kajian di 38 provinsi yang kita lakukan terkait dengan hal ini," ujarnya.

Pertimbangkan Matang

Menyikapi rencana pemerintah akan memberlakukan wajib SNI beras, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengingatkan pentingnya pertimbangan matang sebelum memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) beras secara wajib. Pasalnya, menurut Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BSN, Singgih Harjanto, kebijakan wajib SNI berisiko memberatkan pelaku usaha mikro yang belum siap memenuhi kompleksitas persyaratan dan menghadapi konsekuensi hukumnya.

"Kenapa? Karena, SNI wajib ini mempunyai konsekuensi hukum. Karena akan menjadi problem perundangan yang di dalamnya ada sanksi, dan sanksi ini nanti akan memberatkan pelaku usaha. Kalau mereka tidak tahu bahwa ini sudah diwajibkan," ujar Singgih FGD Regulasi Perberasan, di Jakarta, Rabu (24/9).

Menurutnya, dampak kebijakan (SNI Wajib) akan berbeda pada setiap skala usaha. Pelaku usaha mikro sebagai pihak yang paling terdampak jika kebijakan SNI wajib diterapkan tanpa persiapan memadai. "Ini juga dilihat pelaku usaha mulai dari yang mikro sampai yang besar. Karena itu yang akan menjadi problem atau menjadi yang terdampak besar itu adalah pelaku usaha yang mikro," ujarnya.

Sebagai alternatif, BSN lebih ke pendekatan sukarela dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). "Kalau ada usulan untuk mewajibkan SNI beras, kami menyarankan untuk saat ini SNI tidak dulu diwajibkan sebelum ada kejelasan dulu regulasi mana yang akan digunakan," tegasnya. Padahal di sisi lain, lanjut Singgih, pelaku usaha perberasan juga sudah diwajibkan mendaftarkan izin edar karena registrasi memang wajib.

Saat ini ada tiga regulasi terkait dengan mutu beras, sehingga membuat pelaku usaha menjadi bingung. Pertama, Peraturan Menteri Pertanian No. 31/PERMENTAN/ PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Kedua, Peraturan Badan Pangan Nasional No.2 tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Ketiga, SNI beras itu sendiri.

Sementara itu Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik, Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengingatkan, dalam menyusun regulasi harus mengikuti kaidah penyusunan yang pruden dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan prinsif kehati-hatian, regulasi yang akan diperbaiki dan disusun nantinya tidak kontraproduktif dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

"Dalam menetapkan regulasi harus disesuaikan dengan tujuan regulasi tersebut. Jika untuk mengatasi gangguan pasar, maka pemerintah harus melakukan intervensi. Bisa juga bentuk perlindungan kepada konsumen dan produsen," tuturnya.

Sudi juga melihat karena insentif untuk pelaku usaha yang menerapkan SNI beras belum terlalu besar, maka tidak ada dorongan bagi pelaku usaha menerapkan kebijakan SNI. Selama ini ia melihat, tidak sedikit regulasi yang ternyata tidak mudah dioperasionalkan di lapangan. "Meski secara rasio politik diperlukan, tapi saat implementasi tidak terlihat di lapangan," ujarnya.

Padahal dalam penerapan regulasi ada dampaknya. Karena itu ia mengingatkan kembali, dalam membuat regulasi perberasan, dampak positif harus lebih besar dari dampak negatifnya meski memang tidak bisa dihindari dalam setiap pembuatan kebijakan.

"Jadi dalam pembuatan regulasi harus holistic, tidak parsial dan pengawasan juga perlu dibangun. Selama ini tantangan kita untuk implementasi regulasi adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi itu sendiri," ungkapnya. **Yul**

Pemerintah Susun Kembali
Regulasi Beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun regulasi terbaru terkait keamanan dan mutu beras sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini menjadi dasar bagi pengawasan keamanan, mutu gizi, label, dan iklan untuk pangan segar, di mana beras merupakan salah satu komoditas strategis yang dikonsumsi hampir seluruh masyarakat Indonesia.`



Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional, Yusra Egayanti, menjelaskan bahwa penyusunan regulasi ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang mengintegrasikan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan ke dalam Badan Pangan Nasional. Melalui peraturan tersebut, Bapanas kini memiliki kewenangan dalam penyusunan standar serta pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, termasuk beras.

Menurut Ega, regulasi yang sedang disusun ini kini menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menerbitkan nomor izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Dalam peraturan tersebut, beras didefinisikan sebagai hasil utama dari proses penggilingan bulir padi (Oryza sativa L.) yang seluruh lapisan sekamnya telah terkelupas, sementara lapisan aleuronnya dapat dipertahankan sebagian atau seluruhnya dipisahkan.

Klasifikasi Beras

Regulasi ini membagi beras menjadi dua klasifikasi utama, yaitu beras umum dan beras khusus. Beras umum mencakup beras sosoh dan beras pecah kulit. Sementara beras khusus terdiri dari beras ketan, beras merah, beras hitam, beras varietas lokal, beras fortifikasi, beras organik, beras dengan indikasi geografis, beras dengan klaim kesehatan, serta beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Selain klasifikasi, Bapanas juga mengatur pembagian kelas mutu beras menjadi empat tingkatan, yakni beras premium, medium, submedium, dan beras pecah. Perbedaan di antara kelas mutu tersebut terutama terletak pada kadar butir patah, di mana beras premium memiliki batas maksimal 15 persen, beras medium 25 persen, dan beras dengan mutu di bawahnya dapat mencapai 40 persen. Sementara itu, parameter lain seperti kadar air dan derajat sosoh berlaku sama untuk semua kelas mutu.

Ega menjelaskan bahwa pengaturan mutu pada dasarnya bersifat sukarela, sesuai dengan mekanisme Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, untuk produk pangan dengan risiko tinggi seperti beras, ketentuan mutu dapat diatur melalui regulasi pemerintah. Adapun aspek keamanan pangan bersifat wajib, meliputi pengaturan batas maksimal residu pestisida, cemaran logam berat, penggunaan bahan tambahan, dan penerapan cara produksi yang baik.

Dalam aspek pelabelan, Bapanas menegaskan bahwa setiap produk beras yang dikemas, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor, wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Label harus memuat keterangan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, kelas mutu, tanggal produksi dan kedaluwarsa, asal usul beras, nomor pendaftaran bila dipersyaratkan, serta keterangan halal dan harga eceran tertinggi jika berlaku.

"Bagi beras yang diedarkan dalam rangka program pemerintah atau penugasan khusus, label minimal harus mencantumkan nama produk, nama program, berat bersih, serta nama dan alamat produsen atau importir" ungkapnya.

Selain label, regulasi juga mengatur tentang klaim pada beras. Klaim indikasi geografis harus dibuktikan dengan sertifikat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Klaim gizi maupun kesehatan hanya dapat dicantumkan setelah melalui uji laboratorium dan uji klinis sesuai standar ISO 26642:2010 tentang pengukuran indeks glikemik. Untuk klaim organik, produsen wajib memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi.

Bapanas juga memberikan perhatian pada perkembangan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya dengan zat gizi tambahan untuk meningkatkan nilai gizi masyarakat. Saat ini, Standar Nasional Indonesia untuk beras fortifikasi telah diterbitkan, meski diakui belum semua produk yang beredar memenuhi standar tersebut. Sementara itu, untuk beras biofortifikasi, pemerintah tengah menyiapkan batasan kadar zat gizi yang dapat diklaim, dengan acuan kandungan gizi beras konvensional.

Pengawasan Berlapis

Dalam pelaksanaannya, Bapanas melakukan pengawasan berlapis terhadap produk beras, baik yang sudah memiliki izin edar maupun beras curah yang dijual bebas di pasar. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan contoh, pengujian laboratorium, dan pemeriksaan di sarana produksi maupun distribusi.

Menurut Ega, penegakan hukum tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran, namun sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatan yang dikedepankan adalah pembinaan kepada pelaku usaha. "Sanksi pidana hanya diberlakukan terhadap pelanggaran dengan risiko tinggi yang berpotensi membahayakan konsumen" ungkapnya.

Meski demikian, pengawasan keamanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia pengawas, luasnya wilayah kepulauan Indonesia, serta meningkatnya peredaran pangan secara daring menjadi hambatan tersendiri. Di sisi lain, literasi masyarakat tentang keamanan pangan masih perlu ditingkatkan agar konsumen semakin peduli terhadap mutu dan keamanan beras yang dikonsumsi.

Ega menegaskan bahwa dengan adanya regulasi ini, diharapkan sistem pengawasan pangan nasional menjadi lebih kuat, terstandar, dan transparan. "Regulasi ini bukan hanya sebagai acuan bagi pemerintah, tetapi juga panduan bagi pelaku usaha agar produk beras yang beredar di pasar aman, bermutu, dan sesuai ketentuan," ujarnya. **Herman/ Yul**

Tabel. Persyaratan Mutu Beras

No	Parameter	Satuan	Kelas Mutu			
			Premium	Medium	Submedium	Pecah
1	Derajat sosoh (minimal)	% (b/b)	95	95	95	95
2	Kadar air (maksimal)	% (b/b)	14	14	14	14
3	Butir menir (maksimal)	% (b/b)	0,5	2,0	4,0	5,0
4	Butir patah (maksimal)	% (b/b)	15	25	40	>40
5	Total butir beras lainnya (maksimal)	% (b/b)	1	4	5	5
6	Butir gabah (maksimal)	(butir/100gr)	0	1	2	3
7	Benda lain (maksimal)	% (b/b)	0		0,05	

Tantangan Multidimensi Regulasi Perberasan



Di Indonesia, beras merupakan komoditas strategis yang bukan hanya sumber pangan utama, tapi juga indikator penting stabilitas ekonomi dan sosial. Seiring dengan dinamika pasar yang semakin kompleks, upaya regulasi perberasan nasional menghadapi berbagai tantangan multidimensional.

Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Husnain mengatakan, fenomena pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga, serta potensi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan, mengancam ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat luas.

"Tantangan perberasan tidak hanya berhenti pada aspek kuantitas," ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema "Regulasi Perberasan Nasional di Tengah Tantangan Pasar: Sinkronisasi Kebijakan, Penguatan Mutu, Peran Produsen, dan Perlindungan Konsumen" di Jakarta, Rabu (24/9).

Saat ini kata Husnain, mutu beras juga merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius karena bersinggungan langsung dengan konsumen, baik dari sisi keamanan pangan, kepercayaan publik, maupun ekonomi rumah tangga. Konsumen berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, dan berkualitas dengan harga yang wajar.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi aspek fundamental sekaligus strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memperoleh keadilan dalam rantai pasok beras nasional. "Warisan budaya dan kebijakan pangan yang menjadikan beras putih sebagai simbol modernisasi juga menjadi penting untuk dikaji dalam merumuskan kebijakan perberasan," tuturnya.

Selama ini ungkapnya, beras putih turut berkontribusi terhadap masalah stunting. Sebab beras memiliki kadar serat, zinc, dan magnesium yang rendah dibandingkan beras merah atau cokelat, yang lebih kaya nutrisi untuk mencegah stunting.

Padahal ketergantungan pada beras putih juga membebani ekonomi nasional, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, dan menguras devisa negara. Dengan demikian, mutu beras sangat memengaruhi stabilitas pangan dan kerugian ekonomi.

Untuk memperkuat sistem regulasi perberasan yang efektif, BRMP Pascapanen Pertanian mengembangkan Laboratorium Mutu Beras dan Pascapanen Serealia serta Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beras. Namun menurut Husnain, perlu didukung kolaborasi lintas sektor dan sinkronisasi kebijakan untuk meningkatkan mutu produk dan melindungi konsumen.

Lab Uji Mutu Beras

Untuk pengujian mutu beras, Husnain mengatakan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berencana menambah laboratorium mutu beras ini di daerah sentra. Jadi ada 11 provinsi yang akan dilengkapi laboratorium mutu beras. "Tentu ini perlu pembinaan dan juga perlu dukungan dari semua pihak, sehingga harapannya pengujian beras mutu beras tidak lagi hanya di lab mutu beras yang di Karawang yang saat ini satu-satunya," tuturnya.

Husnain mengakui, mutu beras merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius karena bersinggungan langsung dengan konsumen, baik dari sisi keamanan pangan, kepercayaan publik, maupun ekonomi rumah tangga. "Konsumen berhak memperoleh beras yang aman, bergizi, dan berkualitas dengan harga yang wajar," ujarnya.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi aspek fundamental sekaligus strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memperoleh keadilan dalam rantai pasok beras nasional.

Sementara itu Kepala Balai Besar RMP Pasca Panen, Zainal Abidin menilai, perberasan nasional tidak hanya menyangkut aspek produksi dan distribusi, tetapi juga erat kaitannya dengan regulasi mutu, perlindungan konsumen, dan stabilitas harga. Karena itu, keberadaan sistem pengendalian mutu yang kuat, berbasis standar dan didukung oleh perangkat pengujian serta sertifikasi yang andal, menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, saat ini sudah tersedia laboratorium dengan lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, namun persebarannya belum merata di seluruh wilayah produksi dan distribusi beras. Selain itu, juga telah tersedia Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) dengan ruang lingkup pengujian mutu beras yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2023

Untuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) beras, Zainal mengakui, telah ada. Namun jumlahnya masih terbatas. Selain itu, belum semua produsen memahami proses sertifikasi dan manfaatnya terhadap daya saing produk.

Tantangan SNI Wajib

Zainal mengakui, ada beberapa tantangan jika pemerintah menerapkan SNI wajib beras. Diantaranya, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya SNI dan labelisasi, sebaran laboratorium pengujian yang belum merata, ketimpangan kapasitas laboratorium dan alat uji di daerah.

Selain itu, belum semua laboratorium terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, keterbatasan lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang fokus pada komoditas beras. "Sebagian laboratorium masih membutuhkan peningkatan kapasitas peralatan, kompetensi personel, dan validasi metode uji. Jadi kita masih memerlukan laboratorium di beberapa wilayah untuk bisa memeriksa, bisa sertifikasi dan bisa memberikan pengujian," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan akselerasi dengan penguatan infrastruktur laboratorium, modernisasi peralatan uji, perluasan ruang lingkup akreditasi metode pengujian sesuai SNI terbaru. "Kami juga akan meningkatkan kompetensi SDM, pelatihan teknis berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi analis," katanya.

Tak kalah penting menurut Zainal adalah edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang manfaat sertifikasi terhadap daya saing dan akses pasar. "ini menjadi penting karena jika kita sudah mempunyai standar, maka pasar akan terbuka dan tentunya keamanan menjadi lebih terjamin," tuturnya. **Yul**

Laboratorium Mutu Beras

1. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
2. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
3. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Aceh
4. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
5. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
6. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
7. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Bangka Belitung
8. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember
9. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Gorontalo
10. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kalimantan Selatan
11. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kalimantan Tengah
12. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang
13. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jawa Tengah
14. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bogor – UPT Pengujian Mutu Pangan Segar
15. PT. ICP Eliaborasi
16. PT. Mutu Agung Lestasi
17. PT. Pan Asia Supeerintendence, Batam
18. PT. Saraswanti Indo Genetech Cab. Bogor
19. PT. Saraswanti Indo Genetech Cab. Surabaya
20. PT. Sucofindo Cabang Pontianak
21. PT. Sucofindo Cabang Surabaya
22. PT. Sucofindo SBU Lab Cibitung Bekasi
23. PT. Wilmar Padi Indonesia Unit Serang
24. PT. Wilmar Padi Indonesia Unit Mojokerto
25. PT. Wilmar Padi Indonesia Unit Ngawi
26. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, DKI Jakarta

anen

SNI Wajib Beras, BSN Ingatkan Konsekuensinya

Perbedaan Syarat Mutu Beras

Persyaratan	SNI 6128:2020			Permentan 31/2017		PerBAPANAS 2/2023			
	premium	medium 1	medium 2	premium	medium	premium	medium	sub medium	pecah
Derajat sosoh (minimal) (utk beras sosoh)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Kadar air (maksimal)	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
Butir kepala (minimal)	85%	80%	75%	85%	75%	-	-	-	-
Butir patah (maksimal)	14,50%	18,00%	22,00%	15,00%	25,00%	15%	25%	40%	>40
Butir menir (maksimal)	0,50%	2,00%	3,00%	total 0%	total 5%	0,5%	2,0%	4,0%	5,0%
Butir merah/putih/hitam (maksimal)	0,50%	2,00%	3,00%			total 1%	total 4%	total 5%	total 5%
Butir rusak (maksimal)	0,50%	2,00%	3,00%						
Butir kapur (maksimal)	0,50%	2,00%	3,00%						
Benda asing	0,01%	0,02%	0,03%	-	-	-	-	-	-
Butir gabah (per 100gr)	1	2	3	0	1	0	1	2	3
Benda lain	-	-	-	0	0.05 %	0	0.05 %	0.05 %	0.05 %

Pemerintah telah mewacanakan penerapan SNI wajib beras. Namun rencana tersebut menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) harus melalui kajian yang mendalam. Pasalnya, penerapan SNI wajib pada suatu produk membawa konsekuensi yang cukup besar, apalagi pelaku usaha yang terdampak cukup besar, khususnya skala menengah dan kecil.

Seperti diketahui dalam sistem standardisasi nasional, BSN memang memiliki dua bentuk penerapan SNI yakni sukarela dan wajib. Hingga kini, BSN sudah menetapkan sekitar 15.000 SNI untuk berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga produk industri. Namun, hanya sekitar 322 SNI yang diberlakukan secara wajib, umumnya terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, atau lingkungan hidup.

"Kalau SNI diberlakukan secara wajib, konsekuensi hukumnya jelas. Semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dalam maupun luar negeri, wajib mematuhinya tanpa diskriminasi," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BSN, Singgih Harjanto.

Artinya, produk yang tidak memenuhi standar tak bisa beredar di pasar, dan pelanggar dapat dikenai sanksi. Karena itu, BSN menilai keputusan menjadikan SNI wajib tidak bisa tergesa-gesa. Begitu juga dengan rencana SNI wajib beras.

Selama ini ia melihat, standar mutu beras yang digunakan ada tiga. Pertama, Peraturan Menteri Pertanian No. 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Kedua, Peraturan Badan Pangan Nasional No.2 tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Ketiga, SNI beras itu sendiri.

"Kalau nanti di disepakati hanya ada SNI tentu kami meminta agar peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Bapanas meskipun tetap ada, tidak lagi mencantumkan persyaratan mutu beras. Kalaupun mencantumkan persyaratan mutu itu mengambil dari substansi yang ada di SNI," tuturnya.

Menurut Singgih, adanya tiga peraturan tersebut membingungkan pelaku usaha di lapangan. Padahal SNI sendiri harus sejalan dengan regulasi yang ada dan tidak boleh berbeda. Karena itu harus ada kesepakatan dan komitmen hanya memakai satu persyaratan agar tidak membingungkan pelaku usaha.

"Kalau ada usulan untuk mewajibkan SNI beras, kami menyarankan untuk saat ini SNI tidak dulu diwajibkan sebelum ada kejelasan dulu regulasi mana yang akan digunakan," tegasnya. Apalagi di sisi lain, lanjut Singgih, pelaku usaha perberasan juga sudah diwajibkan mendaftarkan izin edar karena registrasi memang wajib.

Singgih menegaskan pentingnya sinkronisasi antarinstansi. Ia menyarankan agar hanya ada satu regulasi pemerintah yang mengatur persyaratan mutu beras dan regulasi itu cukup mengacu langsung pada SNI. "Kalau nanti ada kebijakan baru dari pemerintah, misalnya penambahan kelas mutu atau isu baru di lapangan, cukup SNI yang direvisi, bukan peraturannya," katanya.

Dengan pendekatan itu, BSN berharap proses penyesuaian standar akan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur harmonisasi antar-kementerian yang panjang. Usulan ini juga sudah disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Utama BSN kepada Sekjen Kementan setelah rapat harmonisasi revisi Permentan No. 31 Tahun 2017.

BSN kata Singgih menyarankan, jika memang disepakati untuk menggunakan SNI sebagai standar mutu beras, maka SNI harus direvisi terlebih dahulu. Sebab, SNI beras yang berlaku sekarang berbeda dengan Peraturan Bapanas dan Peraturan Menteri Pertanian.

"Nanti SNI itu harus direvisi. Kalau disepakati mengacu ke SNI, maka SNI itu sendiri mau mengacu ke mana nih? Apakah regulasi Bapanas atau Peraturan Menteri Pertanian atau mungkin membuat persyaratan lain yang baru, sehingga nanti itu disepakati hanya ada satu regulasi," tuturnya.

Perbedaan yang dimaksud Singgih bukan perkara kecil. Dalam SNI 6128:2020, beras dibagi menjadi premium, medium 1, dan medium 2. Sementara Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 31 Tahun 2017 hanya mengenal dua kelas yakni premium dan medium. Sedangkan Peraturan Bapanas membagi empat yaitu premium, medium, sub-medium, dan pecah.

Perbedaan klasifikasi inilah yang membuat BSN kesulitan menetapkan satu acuan nasional yang diakui semua pihak. Karena itu, BSN mengusulkan hanya ada satu regulasi atau satu persyaratan dalam kebijakan penetapan mutu perberasan. Adanya tiga regulasi yang selama ini berlaku membuat pelaku usaha menjadi bingung.

Kajian Dampak Regulasi

Singgih juga menegaskan, sebelum sebuah SNI diberlakukan secara wajib, harus ada kajian analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment). Analisis ini menilai validitas standar, kesiapan lembaga penguji (laboratorium dan lembaga sertifikasi produk), hingga kesiapan pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil. "Pelaku usaha mikro biasanya yang paling terdampak ketika SNI diwajibkan. Mereka perlu waktu untuk beradaptasi agar tidak terbebani," ujar Singgih.

BSN juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, mulai dari laboratorium uji yang terakreditasi hingga lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang kompeten. Tanpa dukungan ini, penerapan SNI wajib justru berisiko menimbulkan ketimpangan.

Selain itu, sesuai PP No. 34 Tahun 2018, setiap rencana penerapan SNI wajib harus dinotifikasi ke WTO. Tujuannya agar negara lain bisa memberikan masukan terhadap rancangan peraturan tersebut, sesuai prinsip non-diskriminasi dan transparansi dalam perdagangan internasional.

Selama ini, sejumlah produk pangan sudah lebih dulu menerapkan SNI wajib, misalnya air minum dalam kemasan, garam konsumsi beryodium, dan gula kristal putih. Langkah tersebut memang terbukti membantu mengendalikan kualitas produk di pasar dan melindungi konsumen dari barang bermutu rendah.

Di sisi lain, BSN juga menekankan bahwa penerapan SNI bukan sekadar formalitas atau stempel legalitas. Di balik tanda "SNI" yang tertera di kemasan produk, ada mekanisme panjang berupa penilaian kesesuaian. Produsen harus memperoleh Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) melalui proses uji mutu di lembaga yang terakreditasi.

Untuk produk beras, hal ini berarti pengujian kadar air, butir patah, warna, aroma, dan parameter lain yang tercantum dalam standar. Hasil uji ini menjadi jaminan bahwa beras yang beredar memenuhi mutu sesuai kategori.

Jika SNI diwajibkan, mekanisme sertifikasi dan pengawasan akan dikelola oleh kementerian atau lembaga yang menetapkan kewajiban, dalam hal ini bisa Kementan atau Bapanas dengan tetap mengacu pada skema BSN. "Kalau SNI diberlakukan wajib, kementerian atau lembaga yang mewajibkan itulah yang membuat mekanisme persetujuan tanda SNI-nya, termasuk LSPro mana yang digunakan," kata Singgih. **Gsh/Yul**



HKTI Satu dan Menyatukan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono resmi mengukuhkan kepengurusan DPN HKTI periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan usai Rapat Pleno DPN HKTI yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Jumat (3/10).

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menekankan pentingnya persatuan di tubuh HKTI guna memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah serta jadi motor penggerak dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. ”Kita tidak mau menjadi organisasi ramai-ramainya setiap 5 tahun sekali. Semoga kepengurusan ini membawa semangat baru kepada kita semua,” katanya.

HKTI Kepengurusan 2025–2030 adalah HKTI yang satu, menyatukan dan mempersatukan. Tidak ada lagi sekat. ”Kita semua adalah HKTI satu, yang menyatu dan mempersatukan hati. Tidak ada dualisme lagi,” tegasnya.

Dalam lima tahun ke depan, Sudaryono berjanji akan bekerja maksimal menjadi mitra pemerintah, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi, sektor pertanian dan pangan kini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Dengan posisi strategis tersebut, HKTI harus mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat produksi, mendorong inovasi teknologi, hingga memperluas akses pasar bagi petani.

Karena Ketua Dewan Pembina HKTI adalah Presiden Republik Indonesia, menurut Sudaryono, tidak ada alasan bagi HKTI untuk tidak ikut berkontribusi. Ini adalah amanah besar sekaligus kesempatan bagi HKTI untuk menghadirkan solusi nyata bagi pertanian dan pangan bangsa.

”Bagaimana kedaulatan pangan ini menjadi mutlak yang harus kita raih, supaya negara kita tidak lagi tergantung urusan perut dan urusan laparnya kepada bangsa lain. Jadi saya garis bawahi kembali bahwa HKTI harus ikut menyukseskan Program Presiden dalam urusan prioritasnya yaitu pertanian dan sektor pangan,” tuturnya.

Sudaryono mengatakan untuk memperkuat perannya, HKTI berencana membangun sejumlah badan pendukung seperti lembaga riset, badan usaha, serta pusat pelatihan (diklat). “HKTI bukan hanya organisasi seremonial, tetapi rumah besar inovasi. Kami ingin mewadahi ide-ide baru, menyalurkan aspirasi petani, sekaligus menjadi problem solver bagi tantangan pertanian dan pangan,” tuturnya.

Selain itu, kedepan HKTI akan melakukan konsolidasi hingga tingkat daerah. Penguatan struktur organisasi menjadi kunci untuk memperluas jaringan kerja sama, menginventarisir potensi dan tantangan di lapangan, serta memastikan setiap asosiasi petani dapat bergerak dalam satu arah.

HKTI menghimpun banyak asosiasi seperti dari APTRI, KTNA, hortikultura, bawang, beras, jagung, dan lain-lain. Semua berada di bawah satu atap kerukunan. "Fungsi kerukunan inilah yang akan kami maksimalkan untuk kepentingan pangan dan pertanian nasional," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, HKTI harus tampil sebagai organisasi pemenang, yang mampu mengawal cita-cita kedaulatan pangan Indonesia. Indonesia menurutnya, adalah satu dari tiga negara di dunia yang merdeka dari hasil mengusir penjajah. “Semua kita ini bangsa pemenang, punya optimisme,” ujarnya.

Paradoks Negara Kaya

Namun Sudaryono mengakui, ada paradoks Indonesia. Sebagai negara yang kaya, tapi masih banyak rakyat yang miskin. Karena itu, Presiden Prabowo mengajak semua pihak kembali ke Undang-undang Dasar 1945, pasal 33. Ini namanya mahzab Pancasila yakni Kerakyatan.

“Bagaimana kita membumikan pemahaman, kita menolong yang melemah yang kemudian kita namakan ekonomi Pancasila. Jadi yang besar bisa tetap besar dan menolong yang kecil agar lebih berdaya,” katanya.

Karena itu, HKTI berikrar untuk menjadi bagian dari solusi untuk membantu masalah negara. HKTI harus hadir nyata di lapangan, bekerja kompak, dan menjadi motor penggerak bagi petani dan pertanian Indonesia. “Saya mengundang dan menginginkan kiprah aktif dari pengurus HKTI. Organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan, tidak ada pangkat di sini,” tegas Sudaryono.

Sementara itu, saat rapat Pleno di Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal HKTI, Abdul Kadir Karding dengan nada tegas namun penuh harapan mengatakan, momentum ini sebagai awal kebangkitan gerakan petani Indonesia. Bagi Karding, rapat perdana ini bukan hanya seremoni pengukuhan.

“Ini adalah titik tolak konsolidasi besar untuk membangun gerakan petani yang solid, produktif, dan berdaulat,” katanya. HKTI kini memiliki struktur organisasi yang besar dan representatif yakni 129 anggota dewan kehormatan dan pakar, 84 pengurus harian, serta 369 pengurus bidang. Totalnya mencapai 582 orang.

“Namun yang paling penting bukan banyaknya pengurus, melainkan semangat dan komitmen kita. HKTI harus menjadi rumah besar yang benar-benar bekerja untuk petani. Bukan sekadar papan nama, bukan tempat kumpul para elit,” tegasnya. **Tim Sinta**

Agenda Prioritas HKTI

1. Konsolidasi organisasi hingga ke daerah – merapikan struktur pengurus di provinsi dan kabupaten, agar HKTI benar-benar hadir di lapangan.
2. Inventarisasi aset dan gagasan – memetakan potensi petani dan kelompok tani yang tergabung, sekaligus menghimpun ide-ide untuk program produktif.
3. Pembentukan badan usaha, diklat, dan litbang – mendirikan unit-unit usaha yang menopang keuangan organisasi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi petani.
4. Penguatan koperasi petani – mendorong lahirnya koperasi berbasis HKTI yang mampu menjadi sarana akses modal, pupuk, hingga pasar.
5. Jambore Tani Nasional – menggelar pertemuan besar petani se-Indonesia pada November–Desember 2025, sebagai momentum konsolidasi dan pernyataan komitmen bersama.
6. Rakernas HKTI – menyusun kebijakan strategis dan menetapkan roadmap program pertanian nasional.

Nama Besar Menghias Pengurus HKTI

Deretan nama besar menghiasi kepengurusan DPN HKTI 2025–2030. Dari jajaran Wakil Menteri hingga artis papan atas menjadi bagian kepengurusan dalam kapal besar HKTI yang dipimpin Sudaryono yang juga seorang Wakil Menteri Pertanian. Siapa saja mereka?

HKTI resmi diperkuat deretan nama besar. Tidak hanya kalangan praktisi dan akademisi, bahkan Presiden Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI. Selain itu, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Kepala Bappanas/menteri PPN, Prof. Rachmat Pambudy dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, serta Siti Hediati Soeharto.

Sejumlah Wakil Menteri (Wamen) ikut bergabung sebagai pengurus inti Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI. Deretan Wamen yang resmi bergabung antara lain Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, yang dipercaya sebagai Waketum Bidang Perdagangan. Kehadirannya diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian nasional.

Ada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, yang didapuk menjadi Waketum Bidang Pengembangan dan Potensi Desa. Selain itu ada Taufik Madjid yang kini menjabat Sekjen Kementerian. Dengan posisinya, HKTI berharap bisa memperkuat basis petani di desa sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Wakil Menteri Kehutanan, Rahmat Marzuki juga masuk dalam jajaran pengurus DPN HKTI yang diharapkan bisa mewadahi petani di kawasan kehutanan atau LMDH (Lembaga Masyarakat Dekat Hutan). Ada juga Helvi Yuni Moraza yang kini menjabat posisi Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Publik figur Raffi Ahmad juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Humas. Ketua Umum HKTI, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, menyebut keterlibatan banyak Wamen dijajaran pengurus bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal ini akan memperkuat koordinasi program sekaligus mempercepat akselerasi kebijakan HKTI di lapangan.

"Anda bisa lihat, Wamen yang bergabung adalah mereka yang memang punya keterkaitan langsung dengan dunia pertanian dan pangan. Jadi lebih memudahkan koordinasi dan mempercepat program," kata Sudaryono usai Rapat Pleno dan Pengukuhan Pengurus DPN HKTI di Jakarta, Jumat (3/10).

Nama-nama dari kementerian lain yang punya hubungan erat dengan dunia tani juga disiapkan untuk memperkuat bidang masing-masing. Sudaryono menegaskan, kehadiran mereka adalah bentuk kolaborasi konkret antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan petani.

Di luar nama para Wamen, ada satu sosok yang langsung mencuri perhatian yakni Raffi Ahmad. Presenter sekaligus pengusaha ini ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Humas HKTI. Bukan sekadar selebritas, Raffi diketahui saat ini juga menjabat sebagai Urusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Penunjukannya di HKTI diyakini sebagai strategi untuk merangkul kalangan muda dan kreatif agar lebih dekat dengan isu pertanian. Kehadiran Raffi pun menjadi bukti, HKTI tidak hanya berbicara tentang sawah, ladang, dan kebijakan teknis, tetapi juga tentang bagaimana pertanian bisa dikemas dengan cara yang lebih segar, populer, dan mudah diterima generasi sekarang.

Keterlibatan figur publik seperti Raffi Ahmad juga diharapkan bisa membuka kanal komunikasi baru dengan generasi muda. Sudaryono percaya, wajah segar seperti Raffi mampu membuat isu pertanian lebih dekat dengan publik luas.

Sudaryono menegaskan, langkah HKTI merangkul para Wamen dan figur publik merupakan bentuk strategi besar organisasi. HKTI tidak ingin berjalan sendiri, melainkan bergerak bersama pemerintah dan masyarakat. "Kami ingin HKTI jadi mitra strategis pemerintah. Ada banyak program yang bisa kita sinergikan, dari perdagangan, desa, UMKM, sampai lingkungan hidup. Kehadiran para Wamen ini adalah jembatan penting," tuturnya.

Kehadiran para Wamen dan tokoh publik menandai babak baru HKTI sebagai organisasi petani yang tidak hanya solid, tetapi juga strategis. Dari jalur pemerintahan hingga jalur populer, semua dirangkul untuk satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. **Gsh/Yul**

DPN HKTI Periode 2025 - 2030

Ketua Dewan Pembina DPN HKTI :
Jend. TNI. Purn. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Wakil Ketua Dewan Pembina DPN HKTI :
Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS.

Sekretaris Dewan Pembina DPN HKTI :
Gerardus Budisatrio Djiwandono

Ketua Dewan Penasehat DPN HKTI :
Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP.
Wakil Ketua Dewan Penasehat DPN HKTI :
Hj. Siti Hediati Soeharto, SE.
Sekretaris Dewan Penasehat DPN HKTI :
Arief Prasetyo Adi, Ph.D.

Ketua Dewan Pertimbangan DPN HKTI :
Dr. Oesman Sapta Odang
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPN HKTI :
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Sc.
Sekretaris Dewan Pertimbangan DPN HKTI :
Irjend. Pol. Purn. Erwin T.P.L. Tobing

Ketua Dewan Kehormatan DPN HKTI :
Jend. TNI. Purn. Dr. Moeldoko
Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPN HKTI :
H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si.
Sekretaris Dewan Kehormatan DPN HKTI :
Prof. Dr. Arif Satria, SP. M.Si.

Ketua Dewan Pakar DPN HKTI :
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Jafar Hafsah
Wakil Ketua Dewan Pakar DPN HKTI :
Ir. Hj. Delima Hasri Azahari, MS., Ph.D.
Sekretaris Dewan Pakar DPN HKTI :
Ir. Nandra Djajantya Dwaputra

Ketua Umum DPN HKTI :
H. Sudaryono, B.Eng., MM., MBA.
Ketua Harian 1 :
Mayjend. TNI. Purn. Dr. Bachtiar Utomo
Ketua Harian 2 :
Ir. Mulyono Machmur, MS.
Ketua Harian 3 :
Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir
Sekretaris Jenderal DPN HKTI :
H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
Bendahara Umum :
Diana Dewi, SE.





Mulyono Herlambang, Eks Penyuluh Taklukan Pasar Global

Dari seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lereng Gunung Lawu, lahirlah seorang inovator yang kini mengharumkan nama Indonesia di dunia perbenihan. Mulyono Herlambang, sosok sederhana dari Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang berhasil membawa benih hortikultura lokal menembus pasar internasional seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea.

Mulyono dikenal sebagai pendiri CV Multi Global Agrindo (MGA). Ia juga penggagas Training Center OISCA Karangpandan, lembaga yang telah berdiri lebih dari empat dekade dan terus melahirkan generasi muda petani unggul. Namun di balik kesuksesan itu, perjalanan hidupnya penuh lika-liku dan kerja keras yang panjang.

Karier Mulyono dimulai pada awal tahun 1980-an ketika ia bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan. Pada tahun 1980–1981, ia mendapat kesempatan langka untuk belajar ke Jepang. Di negeri itu, ia menemukan arah hidupnya. “Saya berpikir, apa yang bisa saya bawa pulang untuk Indonesia. Kalau belajar mesin saya tidak punya dasar, akhirnya saya memilih belajar tentang benih,” ujarnya mengenang masa itu.

Keputusan itu mengubah jalan hidupnya. Sepulang dari Negeri Matahari Terbit, Jepang, Mulyono berharap bisa ditempatkan di lembaga penelitian atau pemuliaan tanaman. Namun kenyataan berkata lain, ia kembali bertugas sebagai penyuluh lapangan biasa. Tak menyerah pada keadaan, ia memilih membangun sesuatu dari bawah.

Pada tahun 1983, Mulyono mendirikan pusat pelatihan pertanian bagi generasi muda. Karena belum memiliki kantor, ia menggunakan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Karangpandan sebagai tempat sementara. Modalnya hanya semangat dan keyakinan bahwa masa depan pertanian Indonesia ada di tangan anak muda.

Saat itu, harga bawang putih tengah melonjak. Dari hasil bertani bawang putih, Mulyono bisa membiayai berbagai kegiatan pelatihannya. Perlahan namun pasti, kegiatan itu berkembang. Hingga akhirnya pada tahun 1992, OISCA punya tempat pelatihan sendiri. Kini lembaga itu telah berjalan selama 42 tahun dan konsisten melatih pemuda-pemudi di bidang pertanian, menjadikannya salah satu pusat pelatihan pertanian tertua dan paling aktif di Indonesia.

Setelah membangun OISCA, pada tahun 1993 Mulyono mulai menapaki langkah baru, mengembangkan riset perbenihan dan pemuliaan varietas (breeding). Ia membangun sistem riset terpadu yang meliputi tiga aspek utama: perakitan varietas unggul, produksi benih, dan pemasaran.

Dalam tahap awal, ia bersama tim melakukan pengumpulan plasma nutfah, sumber genetik tanaman dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke pedalaman Kalimantan. Tak hanya itu, Mulyono juga menjelajah hingga ke luar negeri seperti Cina, Thailand, dan Nepal untuk memperkaya koleksi genetiknya.

Kini, CV Multi Global Agrindo memiliki bank benih (seed bank) dengan lebih dari 15.000 koleksi plasma nutfah yang disimpan dalam ruang khusus. Dari sana, dilakukan proses seleksi dan penggaluran untuk menghasilkan varietas yang tangguh terhadap penyakit, produktif, dan memiliki cita rasa tinggi. “Kami tidak berhenti meneliti. Dari ratusan varietas calon, hanya sedikit yang benar-benar sesuai dengan kondisi Indonesia,” ujarnya.

Varietas Melon Unggul

Salah satu hasil riset unggulannya adalah melon varietas lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Sejak 1993 hingga 2003, Mulyono telah melahirkan sejumlah varietas melon yang telah diakui dan memiliki izin edar resmi, di antaranya M-15, Melon Ladika, Moonlight, Green Flash, MAI 119, MAI 116, dan Sumo.

Melon hasil racikannya memiliki daya simpan hingga 20 hari, rasa manis khas tropis, dan aroma harum yang disukai pasar premium. “Kami ingin menghasilkan melon yang tidak hanya enak, tapi juga tahan lama, mudah ditanam, dan memberi keuntungan bagi petani,” tutur Mulyono.

Tidak berhenti disitu, saat ini Mulyono sedang melakukan proses seleksi untuk mendapaktan varietas melon baru. Dari 200 calon varietas, ia sudah mendapatkan 51 calon varietas, lalu di kerucutkan lagi menjadi 17 varietas. “Dari 17 varietas akan kita seleksi lagi untuk mendapatkan melon sesuai keinginan petani mulai dari, bentuk, bobot, aroma hingga rasa. Dari 17 ini bisa terpilih 5 varietas saja sudah bagus,” harapnya.



Mulyono mengaku juga ingin meghasilkan varietas melon premium yang saat ini sedang naik daun di pasar dalam negeri. Selain melon, perusahaannya juga memproduksi benih semangka, cabai, tomat, tomat cherry tahan simpan 20 hari, pare, buncis, jagung manis, kacang panjang, sawi, hingga bawang merah dari biji (true seed).

Untuk pasar ekspor, varietas dengan warna kulit gelap seperti pare, timun, dan terong justru paling diminati oleh Jepang. Warna gelap dianggap menandakan kandungan klorofil tinggi faktor penting bagi konsumen Jepang yang sangat peduli pada kualitas gizi dan estetika sayuran.

Kualitas benih produksi CV Multi Global Agrindo terbukti mampu menembus pasar internasional. Produk benihnya kini diekspor ke Jepang, China, dan Korea Selatan, tiga negara dengan standar mutu benih paling ketat di dunia. Fakta ini menjadi bukti bahwa benih lokal Indonesia mampu bersaing di kancah global.

Mulyono mengungkapkan, untuk ekspor benih ke Jepang setiap tahun berbeda jenis dan volumenya. Misalnya tahun 2023 MGA melakukan ekspor benih melon dan mentimun. Tahun 2024 benih paria dan labu/waluh (kabucha), sedangkan untuk tahun 2025 ini benih yang diminta adalah paria dan terong. “Riset tidak boleh berhenti. Meski sudah punya banyak varietas unggul, kami tetap terus mencari yang lebih baik,” tegasnya.

Kini, Mulyono bukan hanya dikenal sebagai pengusaha benih, tapi juga sebagai mentor dan inspirator bagi banyak petani muda. Melalui OISCA, ia menanamkan semangat kemandirian dan inovasi agar pertanian Indonesia tidak tertinggal.

Dari sebuah desa kecil di Dukuh Gerdu, Bloro, Karangpandan, benih hasil kerja keras seorang mantan penyuluh kini tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Mulyono Herlambang telah membuktikan bahwa dedikasi dan ilmu yang ditanam dengan tekun mampu berbuah keberhasilan besar. **Herman/Yul**

Modernisasi Usaha Sapi Perah dengan IoT

Oleh: **Ir. Raden Febrianto Christi, S.Pt., MS., IPM**
Dosen Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran

Kebutuhan protein hewani semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia. Susu merupakan sumber pangan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia karena mengandung zat gizi yang lengkap. Produksi dan kualitas susu yang dihasilkan sangat bergantung kepada kondisi ternak dari sapi perah tersebut.

Performa sapi perah dikatakan baik atau buruknya tidak berdasarkan kepada faktor genetik saja namun faktor lingkungan. Sapi perah adalah salah satu ternak ruminansia besar yang menghasilkan susu dan sebagai sumber penghasilan utama dari peternak rakyat.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini yang berada di negara Indonesia produksi susu hanya mampu menyediakan sebesar 22-23% dari dalam negeri sedangkan sisanya masih mengandalkan pada kegiatan importasi.

Angka persentase tersebut muncul disebabkan karena banyak faktor sehingga menyebabkan rendahnya produksi dalam negeri. Faktor yang terjadi dapat disebabkan oleh manusia sebagai subjek atau peternak, ternak sebagai objek atau faktor lingkungan lainnya.

Di dalam pengelolaan sapi perah peran peternak menjadi salah satu kunci keberhasilan dari usaha sapi perah. Kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki peternak sangatlah penting karena pengelolaan usaha sapi perah yang dijalankan bergantung kepada perkembangan setiap zaman.



Seperti jaman dulu di Tahun 1950 sampai sekarang rata-rata produksi susu sapi perah naik 2-3% bahkan populasi sapi perah mengalami pertambahan namun produksi susu masih belum mengimbangi dengan jumlah tersebut.

Saat itu teknologi belum begitu berkembang sehingga tenaga dan waktu cukup menguras peternak untuk menunjang keberhasilan usaha yang dijalankan.

Faktor lain selain manusia adalah karena ternak sapi perahnya yang secara genetik individu memiliki kelemahan dalam menghasilkan produksi susu.

Kelemahan yang dimaksud adalah produksi susu sedikit karena dari keturunan yang tidak memiliki genetik yang unggul, penyakit menular, kecacatan, serta sistem pencernaan yang terganggu.

Faktor lingkungan yang juga berpengaruh terhadap produksi susu diantaranya suhu, kelembapan, kecepatan angin, teknis dalam proses pemerahan, status fisiologis, serta tingkah laku individu sapi.

Keseluruhan faktor penyebab tersebut tidak dapat dilakukan secara keseluruhan oleh peternak secara manual karena membutuhkan waktu serta tenaga yang berlebih.

Munculnya teknologi yang semakin berkembang di dunia bertujuan agar menciptakan alat yang semakin efektif-mudah dalam penggunaan, efisien dan bermanfaat untuk menunjang kehidupan.

Namun apabila ditinjau kebermanfaatnya teknologi dapat dimanfaatkan pula dalam bidang pertanian khususnya peternakan guna peningkatan produktivitas ternak terutama sapi perah.

Sapi perah yang banyak dijumpai dan dipelihara di Indonesia ada jenis frisian Holstein namun juga tidak semua kondisi ternak dalam keadaan yang murni.

Sapi FH yang dipelihara oleh peternak memiliki kelemahan antara lain tidak mampu pada kondisi suhu yang panas melebihi dari >28oC dan apabila suhu serta kelembapan tidak terkontrol di dalam kandang dapat menyebabkan ternak kehilangan zona nyamannya sehingga menjadi stress kemudian berdampak pada penurunan produksi susu.

Tidak terkontrolnya suhu dan kelembapan disebabkan karena ketidaktahuan peternak terhadap titik ideal suhu ternak sapi perah. Berbagai macam alat pengukur suhu dan kelembapan sekarang ini sudah banyak digunakan untuk memudahkan proses pencatatan agar dihasilkan kondisi yang ideal.

Penggabungan antara Internet dan aplikasi dikenal dengan Internet of Things (IoT) sangat membantu peternak karena mampu meningkatkan performa ternak yang dipeliharanya.

IoT dapat dikatakan sebuah konsep di mana objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi langsung antara manusia atau manusia dengan komputer.

Perkembangan IoT ini berasal dari penyatuan teknologi nirkabel, *Micro Electromechanical Systems (MEMS),* dan objek "Things" pada internet. IoT di beberapa peternakan sapi perah rakyat khususnya yang berlokasi di Lembang, Pangalengan, Sukabumi dan daerah lainnya terdapat peternak yang menggunakan serta mengembangkan alat tersebut untuk tujuan peningkatan produksi.

Di sisi yang lain, penggunaan Closed-Circuit Television) CCTV telah digunakan pula dengan tujuan untuk mengontrol kondisi ternak di dalam kandang. Penggunaan CCTV dapat menduga performa sapi perah berdasarkan kepada tingkah laku kebiasaanya seperti makan, minum, berbaring bahkan estrus.

Selain itu, peternak dapat mengontrol dari manapun untuk melihat aktivitas yang terjadi di peternakan. Hasil penelitian yang telah dilakukan penggunaan alat berbasis IoT mampu meningkatkan usaha peternakan sapi perah yang dijalani karena individu ternak memperlihatkan hasil yang berbeda dari sebelum penerapan terutama produksi susu yang dihasilkan dengan membandingkan terhadap kondisi yang normal.

Oleh karena itu, saatnya peternakan sapi perah mengubah sistem pemeliharaan kearah yang modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada kemudian dipahami oleh peternak agar mampu mengoperasikan dengan benar tanpa harus mendapatkan pendampingan secara terus menerus.

Kolom

Petani Lemah di Tengah Kekuatan Pasar: **Di Mana Peran HKTI?**



Oleh: **Memed Gunawan**

Ada dua catatan penting tentang HKTI yang pengurusnya dikukuhkan pada tanggal 3 September 2025, yaitu bersatunya kembali HKTI sebagai satu organisasi yang solid sesudah sempat terpecah jadi dua organisasi kembar, dan berhimpunnya asosiasi, yayasan dan lembaga yang bergerak di bidang pertanian, termasuk KTNA, di bawah payung HKTI. Ini perkembangan yang menarik.

Tidak dipungkiri bahwa posisi tawar petani sangat lemah dibanding kekuatan pasar yang dihadapinya. Kelembagaan Pedesaan, Koperasi dan Kelembagaan Petani masih rapuh. Petani yang seharusnya menjadi pusat sistem pertanian justru sering menjadi pihak yang paling tidak berdaya. Sementara lembaga-lembaga besar di sekitar pertanian justru semakin kuat. Asosiasi penyedia benih, pupuk, dan pestisida serta perdagangan dan industri pengolahan memiliki jaringan yang luas, modal besar dan teknologi canggih.

Kesenjangan ini akan mengakibatkan rantai nilai pertanian menjadi timpang. Keuntungan besar mengalir ke hulu dan hilir, bukan ke tangan petani, padahal tanpa petani, semua mata rantai itu tak akan bergerak. Sejauh mana peran HKTI sebagai lembaga pertanian yang berisi para pakar, pengusaha dan birokrat tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan bisnis pertanian itu dalam mengungkit kekuatan petani?

HKTI mempunyai akses terhadap pemerintah dan perakit kebijakan. HKTI perlu tampil sebagai advocator kebijakan yang memperjuangkan keberpihakan kepada petani dalam regulasi pertanian, tata niaga, dan subsidi. HKTI adalah Penjaga, Pembela, dan Penggerak Petani Indonesia. HKTI didirikan dengan semangat membela kepentingan petani. Kini, di tengah arus ekonomi yang makin kompetitif, HKTI punya peran yang semakin penting sebagai gerakan besar pemberdayaan petani.

HKTI bisa berperan menguatkan koperasi dan kelembagaan petani. Melalui pelatihan manajemen, digitalisasi, dan pendampingan koperasi tani bisa naik kelas menjadi lembaga bisnis modern yang tangguh. Mendorong akses teknologi dan inovasi menuju pertanian cerdas memanfaatkan teknologi dan manajemen modern.

HKTI menjadi jembatan agar kemitraan antara petani, industri penyedia sarana produksi dan industri pengolahan berjalan setara dan saling menguntungkan. HKTI memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memastikan hal itu terwujud agar petani Indonesia tidak lagi menjadi penonton di ladangnya sendiri, melainkan menjadi tuan di tanah yang mereka garap, penggerak utama ekonomi bangsa.

Dengan berhimpunnya lembaga terkait pertanian di hulu dan hilir, HKTI juga mempunyai akses yang kuat dalam membangun sinergi hulu-budidaya-hilir, menghasilkan distribusi margin yang adil dan menyejahterakan sehingga sinergi ini mewujudkan saling ketergantungan yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Akhirnya HKTI perlu membangun dan memasilitasi program kaderisasi petani muda agar muncul generasi baru yang terampil, berjiwa wirausaha, dan melek teknologi digital. Dengan pendekatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, anak muda bisa melihat bahwa bertani bukan sekadar pekerjaan, tapi masa depan yang menjanjikan. Regenerasi ini sangat penting untuk keberlanjutan sektor pertanian nasional. Selamat Bekerja dan Berkarya HKTI!

Mengembalikan Kejayaan PERBERASAN NASIONAL

Indonesia pernah mengalami kejayaan dalam produksi beras di era 1984-85. Namun masa keemasan tersebut hanya berlangsung singkat, setelah itu produksi beras di dalam negeri mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Kini, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk membangun kedaulatan pangan, khususnya beras.



Melalui kegiatan *Focused Group for Solution* bertema *"Percepatan Perencanaan Produksi Perberasan Nasional dari Aspek Hulu"*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mencari terobosan baru dalam membangun kembali kejayaan perberasan Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah dasar kedaulatan bangsa. Menurutnya, sebuah negara baru bisa dikatakan kuat bila mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya sendiri, mulai dari pangan, air, hingga energi. "Selama kita belum mampu menyelesaikan persoalan makanan pokok, terutama beras, maka kita belum bisa menyelesaikan persoalan lainnya," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencapai masa keemasan perberasan pada tahun 1983–1985. Namun, capaian tersebut hanya berlangsung singkat. Kini, dengan berbagai tantangan baru seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim global, Indonesia perlu memiliki strategi dan visi baru dalam membangun kembali sistem pangan nasional. "Kita membutuhkan arah baru, kebijakan baru, dan program baru. Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk membangun kembali sistem perberasan nasional yang berkelanjutan," tegasnya.

Rachmat menambahkan hal yang dilakukan ini bukan sekadar upaya percepatan, namun menjadi sejarah baru untuk membangun kembali kedaulatan pangan Indonesia. "Kita harus menyiapkan visi baru, strategi baru, dan program baru di bidang perberasan menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya," tegasnya.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alvianto Rudiard menambahkan, isu beras tidak hanya menyangkut urusan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial. Bahkan isu beras ini sangat sensitif. Untuk itu, Pemerintah harus memastikan ruang kebijakan tetap ada untuk menjaga stok nasional dan mengendalikan harga di pasar.

Menurut Febrian, kebijakan pangan tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, karena stabilitas beras berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas dan stabilitas nasional.

Sementara itu Guru Besar IPB University sekaligus Direktur ITAPS, Prof. Dr. Sahara, mengungkapkan produksi beras nasional sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 25,27 juta ton. Meski produksi meningkat, harga beras di pasar justru belum menurun. "Ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi belum diikuti perbaikan sistem distribusi dan efisiensi rantai pasok," ujarnya.

Riset, Inovasi, Penyuluhan dan Benih

Sahara menekankan pentingnya investasi pada riset dan inovasi teknologi pertanian. Ia menilai, kemajuan sektor padi kini tidak lagi ditopang oleh perluasan lahan, melainkan oleh penerapan teknologi baru di tingkat petani. Sayangnya, investasi riset di sektor pertanian Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

"Dana riset kita kecil, peneliti sedikit, dan siklus penelitian benih itu panjang. Untuk menghasilkan varietas unggul, butuh riset bertahun-tahun. Karena itu, dukungan terhadap penelitian menjadi mutlak," tegasnya.

Selain teknologi, Sahara juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian, terutama irigasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. "Tanpa petani yang terampil dan sistem yang mendukung, inovasi teknologi sulit diadopsi secara luas," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Perhiptani, Mulyono Machmur, menekankan pentingnya peran penyuluh dalam percepatan pembangunan perberasan. Menurutnya, penyuluh pertanian bukan sekadar pelaksana instruksi, melainkan agen perubahan di lapangan. "Kalau pendekatannya hanya *top-down*, petani jadi pasif. Memang produksi bisa naik, tapi tidak berkelanjutan," ujarnya.

Mantan Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian ini juga menjelaskan, keberhasilan swasembada beras di era 1980-an terjadi karena adanya gerakan terpadu antara kebijakan dari atas (*top-down*) dan partisipasi dari bawah (*bottom-up*). Pemerintah atau *formal leader mulai dari gubernur, bupati dan bahkan hingga kepala desa* memberikan arah dan fasilitas, sementara penyuluh menggerakkan petani dengan pendekatan partisipatif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, Dwi Andreas Santoso, mengingatkan bahwa keberhasilan usaha tani padi sangat bergantung pada benih yang digunakan. "Komponen benih hanya sekitar 1,9 persen dari total biaya produksi, tapi pengaruhnya terhadap hasil panen mencapai 60 persen," ujarnya.

Ia mengkritisi kebijakan pembagian benih gratis yang justru menurunkan nilai apresiasi petani terhadap benih bermutu. Banyak petani akhirnya menganggap benih tidak memiliki nilai ekonomi karena diperoleh tanpa biaya.

Padahal, menurut Andreas benih unggul adalah investasi. Ketika petani menanam varietas lama seperti Inpari 32, Ciherang, atau Mekongga yang sudah berumur puluhan tahun, produktivitas nasional sulit meningkat.

"Inpari 32 yang menjadi primadona itu dikeluarkan tahun 2013 sudah sekitar 12 tahun. Sementara benih primadona lain seperti Ciherang sudah ada sejak 24 tahun lalu dan Mekongga sudah hadir 21 tahun lalu," ungkapnya.

Dwi Andreas menambahkan, pemerintah memang telah melepas lebih dari 500 varietas padi baru, namun tingkat adopsinya masih rendah. Untuk mengejar ketertinggalan produktivitas dari negara ASEAN lain, perlu ada sistem penyediaan benih unggul yang lebih efisien dan terintegrasi.

Untuk mengembalikan kejayaan perberasan nasional ternyata masih banyak pekerjaan rumahnya.

Herman/Yul


Selamat dan Sukses
atas
Pengukuhan Pengurus Harian DPN HKTI
Periode 2025 - 2030
Jumat, 3 Oktober 2025
HKTI
HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA
SinarTani
SINARTANI.COM
SINTA TV
tabloidsinartani.com
tabloidsinartani.com
@sinarTaniST
tabloidsinartani
SINTA TV
SINTA TV

Swasembada Protein
Kementan Buka Pintu untuk Investor



Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah strategis untuk mempercepat kemandirian pangan nasional, khususnya di sub sektor peternakan. Di tengah tantangan tingginya impor daging dan susu, Kementan mengajak dunia usaha, investor dalam dan luar negeri, untuk berinvestasi di bidang peternakan sapi perah dan sapi pedaging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menegaskan, bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada daging dan susu nasional. “Presiden sangat menaruh perhatian besar terhadap kemandirian pangan. Setelah beras, jagung, gula konsumsi, dan garam sudah dapat dipenuhi dari produksi nasional, kini fokus utama pemerintah adalah daging sapi dan susu. Kita ingin agar kedua komoditas ini juga mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri,” ujarnya.

Agung menuturkan, Kementan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sub sektor peternakan. Pemerintah siap memfasilitasi kemitraan antara investor, peternak lokal, dan koperasi. “Kami menginginkan kolaborasi yang tidak hanya berbasis bisnis, tetapi juga berdampak sosial, yakni meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat konsumsi protein hewani masyarakat,” jelasnya.

Langkah Kementan ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pangan dan peternakan sebagai pilar utama ketahanan nasional. Dalam upaya memperkuat basis produksi, Kementan mendorong pengembangan peternakan berbasis kawasan dan investasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Gandeng Swasta

Salah satu wujud konkret ajakan investasi itu terlihat dalam pertemuan Kementan dengan PT Sultan Pangan Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan distribusi pangan. Dalam pertemuan tersebut, pihak swasta menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di sub sektor peternakan, termasuk pengembangan produksi daging berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

CEO PT Sultan Pangan Perkasa, Septo Adjie Sudiro, menjelaskan bahwa perusahaannya berfokus pada penyediaan pangan bergizi dengan harga yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin berperan aktif dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional dan menghadirkan produk daging yang berkualitas bagi segmen menengah ke bawah. Kami juga berkomitmen melibatkan generasi muda dalam sektor ini agar peternakan menjadi bidang yang menarik dan prospektif,” ujarnya.

Selain menggandeng investor dalam negeri, Kementan juga aktif memperluas jejaring investasi internasional. Salah satu langkah penting adalah kerja sama dengan Brasil, negara eksportir daging sapi terbesar di dunia. Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan peternakan sapi perah tropis, meningkatkan mutu genetik, serta memperkuat kapasitas produksi nasional.

“Kerja sama dengan Brasil membuka peluang transfer teknologi dan investasi di bidang peternakan sapi. Ini menjadi langkah besar untuk mempercepat swasembada daging dan susu, serta mendukung program nasional *Makan Bergizi Gratis (MBG)*,” kata Agung Suganda.

Pemerintah Brasil menyambut baik kerja sama ini. Wilson Gambogi Pinheiro Taques, Chief of Staff Ministry of Agriculture and Livestock of Brazil (MAPA), menyatakan kebanggaan negaranya dapat menjadi mitra strategis Indonesia. “Brasil bangga menjadi mitra Indonesia. Kami percaya kerja sama ini akan meningkatkan volume perdagangan dan memperluas investasi di sub sektor peternakan kedua negara,” ujarnya.



Agung Suganda
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sejumlah investor asal Brasil, seperti Asia Beef dan Indonesia–Brazil Petroleum Consortium, bahkan telah menunjukkan komitmennya untuk membangun peternakan sapi terintegrasi di lahan transmigrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi mencapai Rp 4,5 triliun. Proyek ini akan menjadi model peternakan modern yang berorientasi pada efisiensi produksi, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Tak hanya dengan Brasil, Kementan juga memperkuat kerja sama dengan Tiongkok dan Argentina dalam bidang peternakan. Melalui pertemuan bilateral, Indonesia mendorong percepatan akses ekspor produk peternakan, peningkatan investasi di sektor pakan, vaksin, serta kerja sama riset genetik ternak. Semua langkah ini diarahkan untuk membangun industri peternakan yang tangguh, efisien, dan kompetitif di pasar global.

Sementara itu, dukungan swasta terhadap program pemerintah terus mengalir. Baru-baru ini, sebanyak 563 ekor sapi perah dan 772 ekor sapi bakalan asal Australia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai bagian dari Program Peningkatan Produksi Susu dan Daging Sapi Nasional (P2SDN). Pengiriman ini diinisiasi oleh kerja sama antara Kementan dan perusahaan swasta nasional seperti PT Asli Juara Indonesia.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menyebut kedatangan sapi-sapi tersebut sebagai bukti nyata kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung target swasembada susu pada tahun 2029. “Langkah konkret seperti ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam memperkuat populasi sapi nasional dan memperbaiki genetik ternak lokal,” ujarnya.

Hendra menegaskan, upaya peningkatan populasi ternak tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Kementan terus mendorong penggunaan teknologi reproduksi dan manajemen pakan modern untuk meningkatkan produktivitas sapi perah dan pedaging di Indonesia.

“Sinergi pemerintah, pelaku usaha, investor, dan peternak lokal menjadi kunci mewujudkan kemandirian peternakan nasional. Kami ingin agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor daging dan susu, tetapi mampu menjadi negara dengan industri peternakan yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” katanya.

Humas Ditjen PKH



Penggilingan Padi Ramah Lingkungan, Bawa Muhadi Terbang ke Vietnam

Konsistensi Muhadi, petani asal Desa Dlingo, Mojosongo, Boyolali, membuahkan hasil. Berawal dari rintisan kecil di 2005, kini kelompoktaninya tidak hanya menghasilkan padi organik bersertifikat, tetapi juga mengoperasikan penggilingan beras ramah lingkungan berteknologi *low carbon rice*.

Senyum sumringah terpancar dari wajah Muhadi, petani sekaligus pengusaha penggilingan padi asal Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Saat ditemui tim Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (Maporina) Jawa Tengah, pria 54 tahun ini mengaku bangga karena perjuangan yang ia tekuni sejalan dengan visi-misi Maporina dalam mengembangkan pertanian organik di Indonesia.

Sejak 2005, Muhadi bersama Kelompok Tani Paguyuban Petani Peduli Lingkungan Lestari *Lumbung Bogo* mulai merintis pertanian padi organik. Perlahan tapi pasti, usahanya berkembang. Pada 2011, kelompoknya berhasil meraih sertifikat organik. Dari lahan awal seluas 39,8 hektar, kini sudah meluas menjadi 47 hektar.

"Sarana produksi berupa benih dan pupuk organik kami pinjamkan dari kelompok. Setelah panen, gabah dibeli oleh kelompok dengan sistem potong pinjaman saprodi. Sekarang, kelompok tani yang ikut juga semakin banyak, tidak hanya dari *Pangudi Bogo* tapi juga dari *Pangudi Rahayu*," jelas Muhadi.

Salah satu terobosan penting yang dilakukan kelompok ini adalah manajemen hasil panen. Jika sebelumnya hampir semua gabah dijual, kini hanya 60 persen yang dilepas ke pasar. Sisanya diproses menjadi beras sehat untuk konsumsi sendiri. "Dulu petani menjual semua gabah, lalu justru membeli beras lain untuk dimakan. Sekarang tidak begitu lagi. Kami pastikan petani bisa menikmati beras sehat hasil tanamannya sendiri," tuturnya.

Inovasi lain yang membuat kelompok ini menonjol adalah pengelolaan penggilingan padi. Unit penggilingan milik *Pangrukti Bogo* sudah menerapkan konsep *low carbon rice*, yaitu proses penggilingan yang ramah lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Mesin diesel yang boros energi diganti dengan mesin berbasis listrik. Hasilnya, selain menekan emisi hingga 1,04 ton CO_2 per bulan, biaya produksi juga lebih hemat sekitar Rp 2 juta. "Tujuan utama kami adalah menciptakan rantai pasok beras yang lebih ramah lingkungan, menurunkan biaya produksi, meningkatkan kualitas beras, serta memberi manfaat bagi petani dan lingkungan," ungkap Muhadi.

Meski peralatannya serupa dengan *Rice Milling Unit* (RMU) pada umumnya, penerapan konsep *low carbon rice* terletak pada praktek efisiensi energi dan pertanian berkelanjutan. Beberapa peralatan di penggilingan ini merupakan bantuan dari Pemda Boyolali dan Bank Indonesia.

Dengan mesin yang terawat baik, kapasitas produksi bisa mencapai 3 ton beras per hari, tergantung stok gabah yang tersedia. Dengan konsistensinya, kelompok tani ini sudah mengantongi berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga. Bahkan, Muhadi pernah diundang mengikuti muhibah ke Vietnam untuk berbagi pengalaman.

Djoko W/Herman

Nelia, Minuman Rempah Resep Sang Nenek

Wabah Pandemi Covid-19 yang sempat melanda Indonesia membuat masyarakat lebih banyak mengonsumsi minuman peningkat daya tahan tubuh. Salah satunya minuman rempah. Siapa sangka, berawal untuk pengobatan pribadi, Nelia kini menekuni bisnis minuman kesehatan.

Nelia (43), ibu tiga anak kini memiliki usaha PT. Gazzha Food Kuningan yang beralamat di Kp. Wage Mekarjaya RT 08/RW 04 Desa Gunung Keling Kec. Cianjur Jawa Barat 45552. Jenis minuman rempah yang dibuatnya yakni, teh bedulan. "Minuman rempah ini saya ciptakan berawal saat wabah Covid-19 yang bahan bakunya kunyit asem," katanya kepada Tabloid Sinar Tani beberapa waktu lalu.

Jenis minuman kesehatan lainnya yakni coffe break; passion juice; dan wedang uwuh. Selain minuman dalam kemasan botol, Nelia juga menjual minuman dalam bentuk campuran rempah kering dan diseduh dahulu menggunakan air panas. "Manfaatnya banyak, selain menambah imun mengatasi masalah perut juga bisa mencegah masuk angin juga. Minuman rempah ini bisa diterima juga anak-anak remaja," ujarnya.

Khusus untuk coffe break sendiri, Nelia ciptakan untuk vitalitas pria dengan rasa yang tidak pahit. "Coffee break cleng adalah yang banyak dicari pria karena dapat meningkatkan vitalitas pria dan mematangkan sel sperma dan meningkatkan libido. Permintaannya paling banyak di masyarakat," tuturnya.

Dirinya terus berinovasi menciptakan agar minuman rempah ini makin disukai semua kalangan. Soal harga jual, Nelia mengatakan, harga yang dirinya tawarkan juga sangat murah, mulai dari Rp 20 ribu -25 ribu.

Minuman rempah yang dibuat Nelia kini sudah dikirim ke beberapa daerah di Indonesia seperti Palu dan Papua. Bahkan, ia juga sudah memilki reseller di wilayah tersebut. Dalam seminggu, Nelia mampu menjual hingga 300 botol dengan omzet Rp 5 juta.

Waktu Covid 19, ia mengaku belum memahami cara pemasaran. Saat itu ia masih menjual dengan cara tradisional dari mulut ke mulut dan kemasannya masih menggunakan bungkus plastik. "Awalnya saya pakai botol minuman kemasan yang saya ambil dari pengepul. Bahkan saya belum kenal stiker dan lain-lain, saya masih awam," katanya.

Nelia kemudian mengikuti pelatihan mengenai produk pangan. Dalam pelatihan ia mengakui mendapatkan pelajaran bagaimana mengelola produk pangan hingga pengemasan dan cara memasarkan. "Mulai dari disitu, alhamdulillaah sampai saat ini produk kami banyak di pasaran. Bahkan kami sudah mempunyai gerai UMKM," katanya.

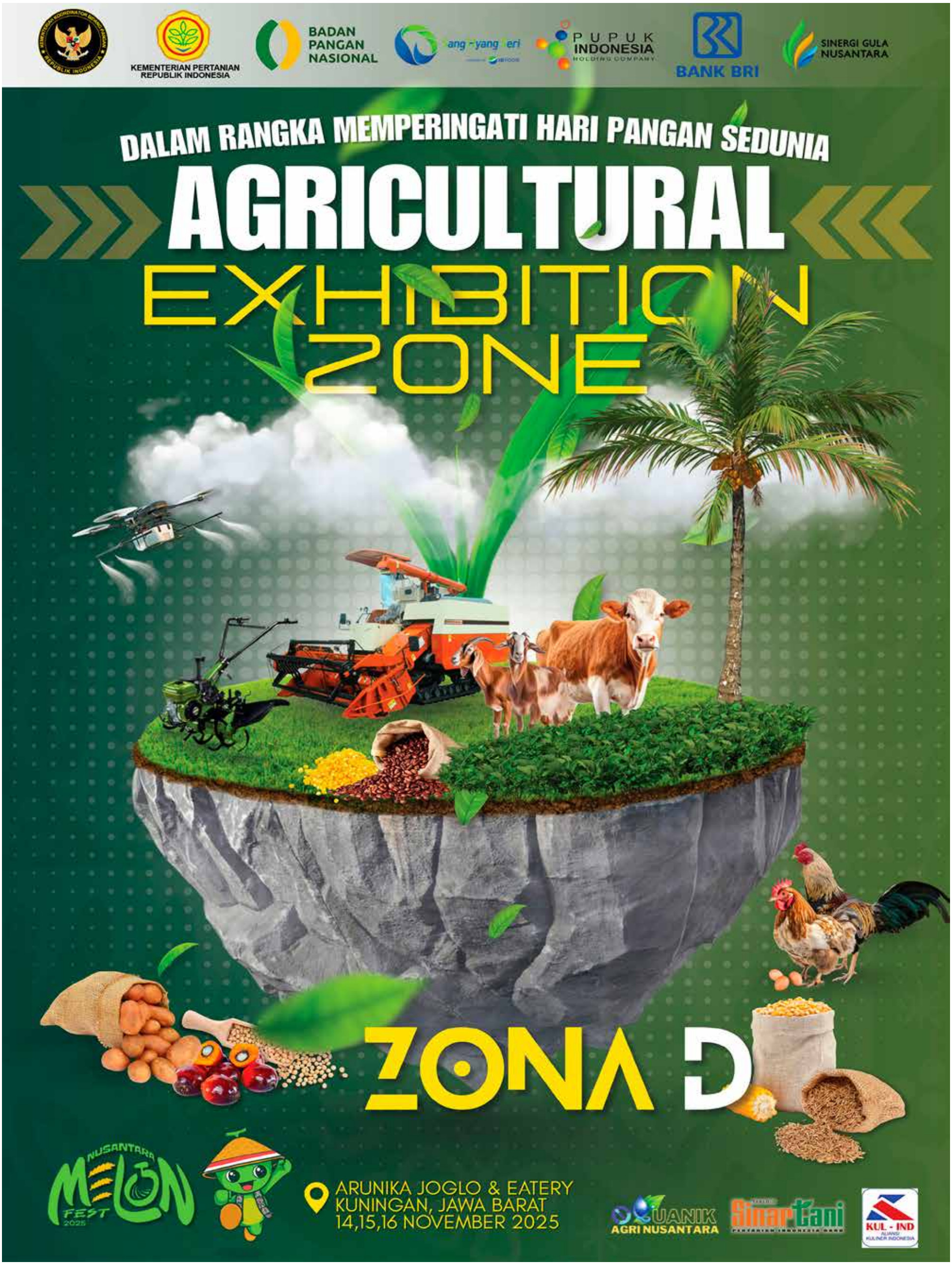
Pada awal memasarkan, Nelia bercerita dirinya tidak mengenakan biaya pengiriman (free order). Namun produknya hanya tahan 4 hari saja, tidak seperti produk makanan kering yang lebih tahan lama. "Ramuan saya akhirnya mulai banyak dikenal, lambat laun banyak permintaan," ujarnya.



Nelia bercerita, awalnya membangun usaha minuman rempah ini ketika banyak anggota keluarga yang terkena Covid-19. Saat itu dirinya tidak kemana-mana, kebetulan minuman rempah ini adalah resep warisan dari nenek.

"Lalu saya buat dan alhamdulillah sekeluarga bisa sembuh dari Covid-19 dan sehat lagi. Teman-teman tanya, saya pakai apa? Saya bilang saya pakai rempah saja. Lalu teman saya minta dan saya kirimkan minuman rempahnya karena mereka juga terkena Covid-19 dan alhamdulillaah sembuh," tuturnya mengenang masa pandemi Covid-19 yang menerpa Indonesia pada tahun 2021-2023.

Echa/Yul


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PANGAN NASIONAL
ang-yang eri
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
BANK BRI
SINERGI GULA NUSANTARA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA
AGRICULTURAL
EXHIBITION
ZONE
ZONA D
NUSANTARA MELON FEST 2025
ARUNIKA JOGLO & EATERY
KUNINGAN, JAWA BARAT
14,15,16 NOVEMBER 2025
AGRI NUSANTARA
Sinar Tani
KUL - IND
ALIANSI KULINER INDONESIA

Komunitas 10 Ton, Petani Subang Rasakan Panen Berlimpah

Petani Subang, Jawa Barat kini bisa tersenyum sumringah saat panen tiba. Pasalnya, jika selama ini hanya bisa menghasilkan 5 ton/ha tiap kali panen, maka kini menembus angka 10 ton/ha.



Bagi Masduki, petani di Desa Mekar Jaya, Compreng, Subang Jawa Barat, bergabung dalam Komunitas 10 ton banyak memberikan manfaat cukup besar. Selama dirinya bertani sejak tahun 1998 baru kali ini mendapatkan hasil hingga 10 ton/ha.

”Setelah saya dikawal sama tim Syngenta, misalnya dalam budidaya dan pengendalian hama dan bergabung dalam Komunitas 10 ton hasilnya lebih baik. Kalau dulu hanya sekitar 5 ton, sekarang hampir tembus 10 ton/ha,” katanya di sela-sela Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Desa Compreng, Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

Sementara Asep, petani dari Patokbeusi, Subang juga merasakan hal yang sama. Meski baru 2 tahun bergabung dalam Komunitas 10 ton, ia juga telah merasakan manfaat dengan peningkatan produktivitas rata-rata mencapai 10 ton/ha. Padahal dahulu hanya sekitar 5-6 ton/ha. Apalagi sekarang ini, harga gabah di petani cukup stabil, bahkan di atas Rp 7.000/kg gabah kering panen.

Komunitas 10 Ton di Subang ini beranggotakan 20 petani dengan total lahan 1,5 ha. Pembentukan komunitas diawali keinginan kuat petani yang ingin mendapatkan hasil panen optimal. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian secara tepat dan mengimplementasikan praktik pertanian yang baik.

Dengan pendampingan Syngenta, komunitas ini berhasil mencapai produktivitas hingga 10 ton/ha atau dua kali lipat dari rata-rata produksi nasional yang berkisar 5-6 ton/ha. Karena itu, keberadaan Komunitas 10 ton memberikan harapan bagi Kabupaten Subang yang sedang berupaya meningkatkan produksi beras.

Pada tahun 2025, produksi padi di Subang mencapai 1 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 900 ribu ton GKG. Dengan semakin banyaknya petani yang bergabung dalam Komunitas 10 Ton diharapkan dapat membantu mendongkrak hasil panen di Kabupaten Subang.

Presiden Direktur Syngenta Indonesia, Eryanto mengatakan, keberhasilan ini menjadi sebuah pendorong untuk mengajak petani padi lainnya bergabung membentuk suatu komunitas agar bersama-sama saling belajar dan berbagi praktik terbaik untuk mencapai hasil panen optimal.

”Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi model pengembangan pertanian berkelanjutan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya saat Festival Panen Raya “Sinergi untuk Indonesia Maju: Memberdayakan Petani, Menguatkan Ekonomi, dan Menjaga Keberlanjutan Pertanian” di Lapangan Stadion Perjuangan, Compreng, Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

Dalam pendampingan tidak semua petani berada dalam Komunitas 10 Ton. Misalnya, di Kalimantan karena rata-rata petani hanya menghasilkan 2-3 ton, Syngenta membangun Komunitas 8 Ton. ”Kalau kita bilang langsung 10 ton, mereka merasa terlalu jauh. Jadi kita membuat komunitas yang membantu mereka berani mendorong diri sendiri, paling kurang naik dua kali lipatkan,” tuturnya.

Syngenta juga telah meluncurkan buku panduan “Raih Hasil Optimal Budidaya Padi” yang merangkum pengalaman dan pengetahuan Syngenta dalam mendampingi petani padi mencapai produktivitas optimal. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian dan menjadi referensi bagi petani dalam menghadapi tantangan lapangan serta menyederhanakan informasi teknis yang kompleks.

Benih Unggul

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat mengatakan, saat ini rata-rata produktivitas tanaman padi di Jawa Barat hanya 5,79 ton/ha. Dengan kolaborasi petani, pemerintah dan dunia usaha menurutnya, mampu menghadirkan produksi padi yang tinggi dan berkualitas. ”Teknologi pertanian, pengendalian hama terpadu, praktek pertanian modern dapat meningkatkan hasil dan kualitas padi,” ujarnya.

Karena itu, Dadan menegaskan, pihaknya kini mendorong petani menggunakan benih unggul yang secara teoritis mampu meningkatkan produktiivtas 15-20 persen. Saat ini petani yang menggunakan benih unggul bersertifikat di Jawa Barat kurang dari 60 persen. ”Bagaimana Jawa Barat meningkatkan produksi, kata kuncinya pakai benih unggul, pupuk berimbang,” ujarnya.

Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan, Ladiyani Retno Widowati juga mengatakan, benih unggul menjadi kunci peningkatan produktivitas tanaman. ”Kita bicara peningkatan produksi kuncinya benih. Mau sebagus apapun pupuk atau tanahnya, sebagus apapun alat mesin pertanian, kalau benihnya tidak bagus, maka tidak bisa tumbuh dengan baik,” tuturnya.

Jadi menurut Ladiyani untuk mencapai target 10 ton/ha, maka kuncinya adalah benih unggul. Saat ini rata-rata produktivitas padi nasional baru 5.7 ton/ha. ”Memang masih ada delta. Mungkin karena apa perbedaan tanahnya, petaninya, pupuk yang dipergunakan. Jika dilengkapi dengan teknologi budidaya yang baik, maka produksi bisa meningkat,” ujarnya.

Tenaga Ahli Menteri PPN/ Bappenas Frans B.M. Dabukke, yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menegaskan, swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintah dalam perencanaan pembangunan nasional. “Untuk mencapai swasembada pangan dan beras, harus ada sinergi dan kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga pemerintah, pihak swasta, hingga pelaku usaha,” katanya.

Selain swasembada pangan, menurut Frans, Presiden Prabowo juga menekankan kesejahteraan petani. Untuk mencapai kesejahteraan, salah satu kunci pokoknya adalah peningkatan produktivitas. Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan menjamin kesejahteraan petani melalui pembelian gabah minimal Rp 6.500/kg di tingkat petani.

Kegiatan panen raya ini menjadi bukti petani dengan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta mampu meningkatkan produksi demi mewujudkan swasembada beras dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan produksi beras nasional periode Januari hingga November 2025, naik 12,62% mencapai 33,19 juta ton dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (29,47 juta ton). **Yul**

Waspadai Jika Konsumsi Ikan Hiu, Ini Alasannya

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini menimpa 24 siswa dan 1 guru di SDN 12 Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat yang mengonsumsi menu berbasis ikan hiu goreng. Kasus ini menjadi sebuah pelajaran bagi para pengelola dapur MBG, khususnya dalam menyusun menu.



Dosen Sekolah Vokasi IPB University dari Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Rosyda Dianah, SKM, MKM mengingatkan, ikan hiu bukanlah bahan pangan yang aman bagi anak-anak karena kandungan logam berat di dalamnya. Bahkan mengonsumsi ikan hiu pada anak-anak sangat berisiko.

Ada beberapa alasan. Diantaranya, hiu adalah predator puncak yang mudah mengakumulasi merkuri, arsenik, dan timbal melalui proses biomagnifikasi. "Akumulasi ini menjadikan daging hiu berbahaya jika dikonsumsi manusia," ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University.

Biomagnifikasi merupakan proses meningkatnya konsentrasi zat beracun dalam rantai makanan. Merkuri yang terakumulasi di laut diserap oleh tumbuhan laut, lalu berpindah ke ikan, dan pada akhirnya terkumpul dalam jumlah tinggi pada tubuh hiu.

"Kandungan metil merkuri pada hiu bersifat toksik, dapat menimbulkan mual, muntah, sakit kepala, hingga gangguan saraf serius. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap efek toksik ini," tambahnya.

Selain merkuri, bagian sirip hiu juga diketahui mengandung arsenik dalam kadar tinggi. Paparan arsenik dapat merusak hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Sementara itu, timbal dalam daging hiu dapat menimbulkan gejala kejang, koma, bahkan kematian.

Karena itu ia menilai, pemilihan ikan hiu sebagai bahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) jelas tidak tepat, apalagi untuk konsumsi anak sekolah. Rosyida pun menyarankan agar penyusunan menu anak-anak mengikuti konsep B2SA: beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Menurutnya, pola makan B2SA memastikan anak-anak memperoleh energi dan gizi yang cukup tanpa risiko kesehatan. "Makanan harus dipilih dari bahan yang aman, mudah diterima anak-anak, serta sesuai kemampuan daya beli masyarakat," katanya.

Selain pemilihan bahan pangan, Rosyda juga menyoroti keutamaan kebersihan dapur dan distribusi makanan. Dapur sehat harus selalu bersih, bebas kontaminasi silang, memiliki fasilitas cuci tangan, serta memenuhi standar pengendalian hama. "Alur kerja yang sistematis, pemisahan bahan mentah dan matang, serta distribusi makanan tepat waktu sangat berpengaruh pada keamanan pangan," ungkapnya.

Menurut Rosyda, kasus di Ketapang dapat menjadi pelajaran agar sekolah, penyedia jasa boga, dan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih serta mengelola pangan. "Anak-anak tidak boleh dijadikan korban dari kelalaian dalam penyusunan menu dan pengelolaan makanan. Konsep B2SA harus menjadi pedoman utama," tegasnya. **Yul**

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

Tabloid Sinartani | Tabloid sinartani.com | SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | tabloidsinartani.com | @SinarTaniST | tabloidsinartani | SINTA TV



Bapanas Bersatu di Kementan

Tak terdengar isu sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan mengganti dengan Andi Amran Sulaiman yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Bapanas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 116/P Tahun 2025 yang terbit 9 Oktober 2025.

Serah terima jabatan yang berlangsung, Senin (13/10) di Gedung E Kantor Pusat Kementerian Pertanian disaksikan Menko bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Kembalinya Bapanas ke Kementerian Pertanian apakah awal dari bergabung kembali lembaga pangan tersebut.

Seperti diketahui, Bapanas dibentuk pada 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021. Pembentukan Bapanas merupakan amanah dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pembentukan lembaga yang khusus mengurusi pangan memang terbilang berjalan cukup lama dari terbitnya UU Pangan tersebut.

Terbentuknya Bapanas melepas stuktur Badan Ketahanan Pangan (BKP) dari Kementerian Pertanian. Tugas dan fungsi yang sebelumnya dilaksanakan BKP diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Bapanas.

Dengan pengangkatan sebagai Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman mendapat amanah lebih besar karena harus mengawal dua lembaga yakni Bapanas dan Kementerian Pertanian. Saat serah terima jabatan Kepala Bapanas, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan apresiasi kepada Amran atas tambahan amanah yang kini diembannya.

Zulhas melihat Presiden menaruh kepercayaan besar karena melihat kapasitas dan pengalaman Amran dalam membangun sektor pertanian yang tangguh. “Pak Mentan, selamat atas tambahan tugasnya. Saya kadang-kadang kasihan melihat Pak Mentan ini karena beban tugasnya berat, tapi kita tahu pikiran Pak Presiden besar dan dampaknya luas, sesuai dengan tujuan kita: merdeka pangan,” tuturnya.

Ia mengingatkan, seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seirama dalam satu komando di bawah kepemimpinan Presiden. Tantangan pangan ke depan, bukan hal yang mudah, tetapi arah kebijakan nasional sudah sangat jelas: menuju kedaulatan dan ketahanan pangan sejati.

“Tidak mungkin kita jadi negara maju tanpa kedaulatan pangan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, nasib petani, nelayan, dan peternak. Jadi tidak boleh ada manuver lain, semua harus satu arah,” tegas Zulhas.

Zulhas juga menyinggung keterkaitan antara ketahanan pangan dengan pengembangan energi terbarukan yang tengah digarap pemerintah. Menurutnya, sistem pangan yang kuat akan berdampak langsung pada nilai ekonomi dan ekosistem energi nasional. “Kalau kita sudah sepaham, dampaknya luas. Jagung laku, singkong laku, tanah tidak ada yang kosong karena harganya bagus. Ini semua bagian dari ekosistem kemandirian bangsa,” ujarnya.

Dengan tambahan tanggung jawab sebagai Kepala Bapanas, Kementerian Pertanian kini memegang peran strategis untuk memastikan seluruh rantai pangan nasional berjalan dalam satu arah kebijakan. Di bawah komando langsung Presiden Prabowo, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama percepatan swasembada pangan, bukan hanya sebagai target, tapi sebagai bukti nyata bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan.

Setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Bapanas, Amran Sulaiman langsung tancap gas. Amran menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan capaian Bapanas selama empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Arief. “Terima kasih atas kerja sama selama ini. Empat tahun terakhir kerja luar biasa. Rating di bidang pangan juga luar biasa,” ujarnya.

Mengemban dua amanah, Amran memastikan bahwa dirinya segera mensinkronkan seluruh program pangan, mulai dari produksi, stabilisasi stok, hingga pengendalian harga di tingkat nasional. “Kita hanya punya satu visi, yaitu visi Bapak Presiden: swasembada pangan. Insyaallah kalau tidak ada aral melintang, gagasan besar itu bisa jadi kenyataan dalam waktu dekat. Target empat tahun kita percepat jadi satu tahun. Ini kerja kita semua tanpa kecuali,” tegasnya penuh semangat.

Sinergi K/L Pangan

Amran juga menyoroti pentingnya sinergi antara Kementan, Bapanas, Bulog, dan lembaga lainnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan nasional.

Tak hanya fokus pada beras, Amran menyebut program swasembada juga akan diperluas ke berbagai komoditas strategis seperti jagung, gula, sawit, minyak nabati, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, kopi, dan kakao. Dengan begitu, kemandirian pangan Indonesia tak hanya berdiri di satu kaki, tapi menjadi gerakan nasional lintas komoditas.

“Presiden sudah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar program, tapi martabat bangsa. Karena itu, setiap jengkal tanah yang bisa ditanami dan setiap petani yang mau bergerak harus kita dukung sepenuhnya. Itulah semangat kita ke depan,” ujar Amran menegaskan.

Sementara itu, Arief Prasetyo yang resmi dicopot dari jabatan Kepala Bapanas. Namun, Istana memastikan langkah itu bukan sanksi, melainkan bagian dari strategi besar menempatkannya pada tugas baru yang lebih strategis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menempatkan Arief pada posisi baru yang masih dirahasiakan publik. “Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat lain. Maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian,” ungkap Prasetyo saat ditemui usai rapat terbatas di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10).

Mensesneg menjelaskan, penunjukan Amran sebagai Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian merupakan langkah efisiensi dan penguatan koordinasi antar lembaga. Sebab, secara fungsi dan tugas, Bapanas memiliki keterkaitan erat dengan Kementerian Pertanian.

“Yang pertama, fungsi dari tugas Badan Pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Hubungan antara Kementan dan Bapanas juga selalu beriringan, sehingga penggabungan ini justru akan mempermudah koordinasi,” tambahnya.

Sejumlah sumber di lingkungan Istana menyebut, posisi baru Arief masih bersifat rahasia, namun dipercaya tetap berkaitan dengan bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Pengalaman panjangnya di sektor logistik dan industri pangan dinilai menjadi modal penting untuk mendukung kebijakan pangan nasional yang lebih luas di bawah arahan Presiden Prabowo. **Yul**


TABLOID Sinartani
TABLOID SINARTANI.COM
SINTA TV
Tabloid Sinartani Mengucapkan
Selamat
& SUKSES
atas dilantiknya
ANDI AMRAN SULAIMAN
Sebagai
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL
NATIONAL FOOD AGENCY